

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

“You can not have a democracy unless the people have an independent source of quality information on which they can make and form decision “ (Bill Kovach-Investigative Reporting Workshop, interviewed by Charles Lewis, 2012)

Minggu, 6 Maret 2011 Jepang diguncang skandal politik. Seiji Maehara, mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Luar Negeri Jepang. Ia mengundurkan diri karena diketahui menerima donasi politik ilegal dari seorang warga negara Korea (Kompas, 8/3/2011). Maehara mengakui menerima sumbangan dana politik sebesar 250.000 yen (sekitar Rp 27 juta) dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan perdana menteri Naoto Kan dari Partai Demokrat Jepang yang sudah terlanjur tidak populer, skandal ini semakin mendelegitimasi otoritas pemerintah di mata rakyat.

Di Indonesia, catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga 2012 menunjukkan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan karena kasus korupsi berkisar 2.510 orang, dari total hunian 147.276 orang (Kompas, 1/10/2012). Lebih memprihatinkan ketika publik dipaksa menyaksikan usaha-usaha masif untuk menyunat kekuatan komisi anti rasuah Indonesia, KPK, lewat usaha revisi UU KPK no 30 tahun 2002, dan kriminalisasi salah satu penyidik.

Lain pihak, Azyumardi Azra mencoba menganalisis transisi demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang populer dengan istilah *the Arab Spring*. Lewat teori jebakan demokrasi, menurutnya masa depan transisi jauh dari selesai di negara-negara ini (Kompas, 10/3/2012). Demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi masing-masing *locus* masyarakat untuk berpartisipasi dan beraktualisasi, ternyata hanya membawa rakyat ke dalam suatu kepemimpinan kolektif tunggal yang baru. Dalam negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, demokrasi hanya memberikan peluang bagi partai-partai Islam (moderat dan Salafi) untuk merebut kekuasaan melalui pemilu demokratis. Dengan kerangka demokrasi, dan memenangi pemilu-seperti terlihat di Tunisia dan Mesir-partai-partai Islam dapat menerapkan agenda dan program ideologis mereka sendiri, khususnya adopsi pemberlakuan syariah dalam konstitusi. Suatu manifestasi tirani mayoritas dan represi terhadap minoritas.

Dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, pendelegasian kewenangan dan pemisahan kekuasaan merupakan syarat mutlak. Sering mengacu pada filosofi *trias politica* Montesqieu, demokrasi adalah antitesis dari sistem otoritarian dengan pemegang kekuasaan tunggal dan sentralistis. Pada kenyataannya, sistem ini memungkinkan lahirnya banyak celah yang terkadang berkelindan dan laten, untuk kemudian mengkhianati takhta tertinggi di tangan rakyat itu sendiri.

Kasus Jepang, Indonesia, dan Timur Tengah menunjukkan bahwa seberapa pun sempurnanya suatu sistem demokrasi, tetap saja ada celah yang coba untuk diterobos. Gratifikasi, mahal nya biaya politik, lemahnya akuntabilitas publik, korupsi, dan permasalahan di titik legal formal pemerintahan lainnya hanyalah sekelumit "noda demokrasi". Pada titik inilah supremasi masing-masing pilar penyangga tiang demokrasi dipertanyakan. Usaha intrusi dilakukan secara

berjamaah. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif seolah berkelindan mengkhianati kepercayaan rakyat. Dalam kulminasi, lahir dan disebut-sebutlah pers, sebagai pilar keempat sekaligus panacea bahwa demokrasi masih memiliki harapan.

Ketika diminta memilih dan menegaskan pentingnya peran pers dalam sistem sosial politik suatu negara, Thomas Jefferson dalam suratnya bertanggal 16 Januari 1787, kepada Kolonel Edward Carrington, berujar:

Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government. I shouldn't hesitate a moment to prefer the latter (Shapiro, 1987:57)

Pers menjadi satu-satunya ruang fisik dan imajiner, tempat aspirasi warga tercurah, dan sebaliknya kebijakan pemerintah dan kinerja negara terefleksikan. Dialektika antara sistem (negara dan kapital) serta solidaritas sosial (masyarakat sipil) menjadi sebuah keharusan. Karena pers, menjadi salah satu jaminan utama terwujudnya demokrasi radikal dalam sebuah negara hukum.

Freedom House, lembaga independen non profit yang mengkaji proses demokratisasi Negara-negara di seluruh dunia, dan menelurkan indeks demokrasi, selalu memasukkan kebebasan pers (*press freedom*) sebagai salah satu parameter dan unit analisis. Logika sederhananya adalah, proyeksi demokrasi di sebuah negara akan berjalan baik dengan dukungan yang konstan terhadap kebebasan pers. Indonesia, yang selalu disanjung sebagai prototipe “negara Islam” demokratis terbesar dan dijadikan patron bagi transisi demokrasi negara-negara Arab, kenyataannya belum mampu memberikan perbandingan linear bagi kebebasan pers. *Committee to Protect Journalist* mengkategorikan Indonesia sebagai “negara paling mematikan” bagi

jurnalis urutan ke 13¹. Dengan perkiraan bahwa 75% wartawan yang bertugas meliput kasus-kasus korupsi, dipastikan mengalami kekerasan fisik (<http://cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-indonesia.php> diakses tanggal 14/10/2012, pukul 22.43) Indonesia menjadi negara paling mematikan kedua di Asia Tenggara bagi para jurnalis. Sementara itu *Freedom House* mendudukkan Indonesia dalam peringkat ke 71 di antara 194 negara untuk kategori kebebasan pers². Skor 61 ke atas menunjukkan bahwa negara yang bersangkutan masih belum bisa menjamin kebebasan pers.

Masih mengutip *Committee to Protect Journalist*-pers yang bebas adalah jaminan terselenggaranya peneguhan hak-hak sipil, dan penghormatan terhadap HAM. Keduanya krusial dalam sistem demokrasi.

Bahaya Sentimen Nasionalis dan Paradoks Pengetahuan

Penelitian terhadap kebebasan pers dan proses demokratisasi menarik dan relevan bagi kasus Indonesia. Meskipun demokrasi dan liberalisme Barat kini mulai

¹ Deadliest Countries in 2012 : Syria, Somalia, Pakistan, Brazil, Nigeria, Cambodia, India, Tanzania, Thailand, Bahrain, Lebanon, Bangladesh, Indonesia, Ecuador <http://cpj.org/killed/2012/> (diakses tanggal 14/10/2012, pukul 22.30). Data ini cukup mengejutkan, mengingat posisi Indonesia berada jauh di bawah Meksiko (yang marak dengan berita represi terhadap jurnalis yang memberitakan kasus kartel narkoba) maupun negara-negara dalam transisi demokrasi Arab lainnya. Sehingga ungkapan menjadikan Indonesia sebagai patron dirasa kurang tepat. Committee to Protect Journalist (CPJ) sendiri adalah organisasi nirlaba, didirikan pada 1981 dan berbasis di New York. Fokus pada usaha menyuarkan kebebasan pers. riset, dan bantuan advokasi hukum bagi jurnalis yang menerima represi akibat pemberitaannya. Selain itu CPJ juga aktif memberikan pendidikan dan beasiswa jurnalistik.

² <http://www.worldaudit.org/press.htm> (diakses tanggal 14/10/2012 pukul 20.55). Freedom House mengukur indeks kebebasan pers berdasarkan tiga indikator. *Legal environment* (hukum, konstitusi, dan regulasi), *politic environment* (triangulasi negara, pasar, media dan pengaruhnya terhadap pers yang bebas) dan *economic environment* (ownership, extra media, dan pengaruhnya terhadap independensi). Selain kebebasan pers, indeks demokrasi mereka telurkan pula dari parameter *political rights*, *civil liberties*, dan *corruption*. Parameter ini nantinya akan diadaptasi sebagai unit analisis untuk mengukur derajat "coverage" terhadap proses demokratisasi, ditambah dengan indikator yang diderivasikan dari pemikiran lainnya seputar demokrasi (lihat Kerangka Teori dan sub bab definisi operasional).

diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, proses konsolidasi ke dalam nasion-nasion yang plural bukanlah tanpa masalah.

Fareed Zakaria, meneliti bahwa bentuk pemerintahan demokratis sedang menjadi tren di dunia internasional. Sekitar 62% negara di dunia mengklaim dirinya sebagai negara demokratis dan berbagai negara di dunia masih terus mengupayakan diri agar diakui sebagai negara yang menganut sistem demokrasi (Zakaria, 2003: 13). Senada, Jürgen Habermas menyerukan bahwa demokrasi radikal adalah jalan sintesa satu-satunya bagi liberalisme dan komunitarianisme. Termasuk pula satu-satunya jalan alternatif mendamaikan dominasi pasar dan kekuasaan hegemonik (Hardiman, 2009 : 257).

Meski demikian, transisi demokrasi dan proses konsolidasi diidentifikasi sering berbuah konflik daripada perdamaian. Mansfield dan Snyder (dalam Widjajanto, dkk : 2007: 75) memperingatkan bahwa proses demokratisasi di negara yang memiliki legitimasi vertikal cenderung rendah, seperti di Indonesia akan diikuti oleh pelebaran spektrum politik, kemunculan kepentingan sesaat yang dapat dinegosiasikan di kalangan elit, kompetisi untuk mendapat dukungan massa seluas-luasnya, dan melemahnya otoritas politik pusat. Keempat dampak proses demokratisasi ini cenderung akan membawa masyarakat ke arah konflik horizontal terutama karena institusi politik yang ada tidak dapat mengantisipasi ledakan partisipasi politik yang begitu besar.

Dalam bukunya yang lain, Jack Snyder menegaskan bahwa konflik yang rawan terjadi dalam proses demokratisasi, akan semakin parah tatkala sentimen nasionalis dilibatkan (Snyder, 2000: 11-28). Snyder mengidentifikasikan nasion atau bangsa tidak sekedar sebagai *ethnic group*. Lebih jauh dengan distingsi yang dimiliki masing-masing nasion tersebut, dikehendaki sebuah pemerintahan yang otonom dan

berpihak bagi kelompok (*aspire to self-rule*). Dengan demokratisasi, dimana masing-masing nasyon diberi ruang kontestasi secara terbuka, partisipasi politik secara aktif, dan keran kebebasan pers yang terbuka lebar, sentimen nasionalisme mudah tersulut³.

Demokratisasi dapat menggiring sentimen nasionalisme ke arah konflik terbuka jika ditemukan dua hal. Pertama, aspek historis friksi antara masing-masing nasyon yang telah mengakar sejak sebelum proses transisi demokrasi, kedua, jika elite dan propagandis menggunakan nasionalisme dan politik identitas demi kepentingan pragmatis. Dalam demokrasi setengah-setengah elit sering bisa memanfaatkan kedudukan mereka dalam pemerintahan, perekonomian, dan media massa untuk mengobarkan nasionalisme, dan dengan demikian menentukan agenda wacana umum. Konflik nasionalis muncul sebagai hasil samping upaya elite membujuk rakyat menerima gagasan gagasan nasionalisme yang sarat sentimen perpecahan (Snyder, 2000 : 12).

Demokrasi yang terkonsolidasi memang terbukti mengurangi potensi konflik SARA, tetapi langkah awal transisi menuju demokrasi yang terjal meningkatkan konflik sejenis, khususnya di negara-negara baru. Meski demikian segala kompleksitas demokratisasi sering terlupa untuk diberitakan oleh media. Media sering terjebak dalam paradoksal hegemonial yang terbentuk oleh tarik ulur dua kekuatan sistem yang membentuk media, politik kekuasaan dan ekonomi-politik pasar (Piliang, 2005: 213-214).

Di bawah hegemoni politik kekuasaan, media dikuasai oleh politik informasi maupun politisasi informasi, yang menjadikan informasi sebagai alat kekuasaan

³ Ada beberapa bentuk Sentimen Nasionalis. Yakni Sentimen Nasionalis Sipil, Sentimen Nasionalis SARA, Sentimen Nasionalis Revolusioner, dan Sentimen Nasionalis Kontra Revolusioner. Sentimen Nasionalisme akan dipinjam sebagai salah satu dimensi unit analisis yang akan melihat sebrapa jauh dan dalam *coverage* pers terhadap proses demokratisasi (lihat sub bab metodologi).

politik, media menjelma menjadi perpanjangan tangan penguasa, dan menguasai ruang publik (contoh Pers Indonesia era Orde Baru). Di lain pihak, di bawah kekuasaan ekonomi-politik pasar dan modal, informasi dijadikan sebagai alat untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengeksploitas publik, sebagai salah satu prinsip dasar kapitalisme (contoh *News of The World*, di bawah kekuasaan Rupert Murdoch yang menghalalkan segala cara, termasuk penyadapan, demi meraup keuntungan).

Produk pemberitaan terkungkung dalam paradoks pengetahuan yang dihasilkan : objektivitas/subjektivitas, kebenaran/kepalsuan, realitas/simulakra, fakta/rekayasa, transparansi/kekaburan, kejujuran/kepalsuan, keadilan/keberpihakan (Piliang, 2005: 215). Berbagai paradoks pengetahuan ini muncul ketika media menjadi bagian dari sebuah sistem ideologi (ekonomi atau kekuasaan politik) dan sistem kekuasaan, yang sangat menentukan arah perkembangan dengan mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas.

Meski demikian, khusus untuk pemberitaan mengenai transisi dan konsolidasi demokrasi, dalam sebuah sistem pers yang bebas dan independen sekalipun, paradoks pengetahuan masih mungkin terjadi. Paradoks informasi terjadi dalam kecenderungan konvensionalitas/pelanggaran *mainstream* (dimana pemberitaan mengenai demokratisasi memandang demokrasi itu sendiri sekedar sebagai sistem politik dengan segala manifes legal-formalnya) dan holistik/ progresif (memandang demokrasi tak sekedar sebagai sistem politik, melainkan juga sistem sosial dengan segala kompleksitas kebebasan, kesetaraan, dan *civil society*).

Pers yang cenderung memilih proses konvensional dalam memberitakan proses demokratisasi, berarti menisbikan hakikat demokrasi itu sendiri. Selain itu ia tidak bisa secara komprehensif, untuk tidak menyebutnya gagal, menunaikan tugas

sebagai ruang publik. Karena kemaslahatan dan kesejahteraan publik, dalam sistem demokrasi, tidak hanya ditentukan oleh pemilihan umum yang luber jurdil, sistem multipartai, diversifikasi kekuasaan, dan sebagainya. Sebaliknya, pers harus berangkat dari akar dan hakikat lahirnya demokrasi itu sendiri, hasrat akan kebebasan.

Kompas Sebagai Yang Pertama

Surat kabar harian Kompas, merupakan salah satu produk pers dari emperium media Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Di bawah naungan grup media terbesar kedua setelah Grup Jawa Pos, SKH Kompas memiliki oplah terbesar, dengan distribusi hampir di seluruh penjuru Indonesia (Keller, 2009: 43). Semenjak berdirinya di tahun 1965, Kompas telah berkembang menjadi surat kabar yang matang. Dengan jumlah halaman per harinya mencapai lebih dari 35 halaman, banyak ruang memungkinkan untuk eksplorasi dan elaborasi lanjut. Hal ini nampak dengan inovasi Kompas dalam menurunkan artikel-artikel *in-depth* secara berkala. Seperti Jajak Pendapat Kompas yang hadir tiap Senin, Jejak Nasionalisme, Ekspedisi Cincin Api, hingga rubrik Konsolidasi Demokrasi di Daerah-Daerah yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

Konsolidasi Demokrasi di Daerah-Daerah adalah rubrik suplementasi di dalam halaman Politik & Hukum (2-5) yang mengupas proses demokratisasi di daerah-daerah. Rubrik ini hadir setiap bulan, dengan alokasi satu provinsi baru per bulannya. Liputan untuk setiap provinsi biasanya akan terbagi dalam 6-8 tulisan. Sehingga proses eskplanasi konsolidasi demokrasi dalam satu provinsi akan berlangsung dalam 6-8 edisi harian SKH Kompas. Rubrik ini dimulai sejak tanggal

28 Januari 2001, dimulai dengan elaborasi proses konsolidasi demokrasi di provinsi Jawa Barat, dan masih berlanjut hingga tulisan ini disusun.

Rubrik ini menarik karena diturunkan oleh Kompas, yang notabene salah satu media terbesar di Indonesia. Kompas adalah yang pertama dan hingga tulisan ini diturunkan menjadi satu-satunya media yang mau memulai untuk secara komprehensif dan holistik menganalisis proses demokratisasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Produk lain yang sejenis mungkin dapat ditemukan di Metro Tv lewat program “Genta Demokrasi”. Namun Genta Demokrasi terlalu luas dan umum membahas isu politik. Ia tidak secara spesifik berfokus pada usaha melihat proses demokratisasi di Indonesia, seperti apa yang dilakukan oleh Kompas.

Selain itu, senada dengan paparan sebelumnya, penelitian ini berangkat dari kegelisahan. Apakah media sekelas Kompas juga akan terjebak dalam paradoks pengetahuan, yang membatasi elaborasi demokrasi sebatas pada politik legal-formal, sementara aspek-aspek penting yang harus dipelihara dan dikembangkan dalam proses demokrasi, justru luput dari perhatian?

Dalam narasi pengantar, redaksi menulis seperti ini:

”Indonesia makin memperkuat pilar-pilar demokrasi. Salah satu poin penting adalah membangun pelebagaan sistem politik yang makin demokratis. Hal itu tercermin pada penataan pembagian kekuasaan yang memungkinkan ”check and balance”, pelebagaan sistem kepartaian, improvisasi sitem pemilu, hingga penataan relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks itu proses demokratisasi merupakan proses yang belum selesai. Dalam praktiknya, muncul sejumlah persoalan, termasuk karut marut atau efek demokrasi yang kurang konstruktif ”

Narasi pengantar yang muncul dalam edisi pertama rubrik konsolidasi demokrasi di daerah, yang diawali oleh provinsi Jawa Barat ini, seolah menyiratkan

bahwa dalam memperkuat pilar-pilar demokrasi, pelebagaan sistem politik merupakan hal yang utama. Namun Kompas tak boleh alpa, bahwa dalam memperkuat pilar demokrasi, pelebagaan masyarakat madani, kesejahteraan, kebebasan dan persamaan, juga turut ambil andil dalam menjamin kesempurnaan sebuah sistem demokrasi. Hal itu ingin coba saya kaji lewat penelitian ini.

Saya merasa bahwa penelitian ini akan mampu mengembangkan diskusi yang menarik di masa yang akan datang. Topik demokrasi dan demokratisasi telah cukup memiliki basis ruang diskusi yang mapan di Indonesia, namun dalam praktik bermedia, belum banyak penelitian yang mengkaitkan fenomena ini dengan hak dan tanggung jawab yang diemban media sebagai *the fourth estate*. Lebih jauh lagi, kajian ini akan meminjam banyak pemikiran. Mulai dari Jurgen Habermas, Isaiah Berlin, Fareed Zakaria, Alexis de Tocqueville, Ronald Takaki, hingga tokoh klasik kajian media macam Reese & Shoemaker, Denis McQuail, dan Noam Chomsky. Bukan bermaksud untuk memaksakan pencampur adukan pemikiran, namun justru karakteristik distingtif tersebut memperkaya argumentasi dalam memandang diskursus demokrasi dan pers yang sangat luas.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kecenderungan pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia?
2. Apakah kecenderungan pemberitaan demikian sudah merepresentasikan peran pers sebagai *the fourth estate* dalam mengawal proses demokratisasi secara ideal?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kecenderungan pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.
2. Menilai idealisasi pemberitaan terhadap proses demokratisasi, berdasarkan peran pers sebagai *the fourth estate* dalam sistem demokrasi.

I.4 Kerangka Teori

Penelitian ini akan mengacu pada tiga kerangka teori utama. Indikator Demokrasi (hasil telaah dari indikator demokrasi *Freedom House* dan *World Audit Democracy*) akan digunakan untuk menurunkan indikator-indikator yang penting dilihat dalam proses konsolidasi demokrasi. Begitu pula halnya dengan kerangka teori Sentimen Nasionalisme Snyderian dan Konflik Demokratisasi, yang memberi perspektif baru dalam melihat cakupan proses konsolidasi demokrasi.

Keduanya berperan tentu saja untuk melihat kecenderungan pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas untuk isu-isu demokratisasi.

Kerangka teori terakhir adalah Produksi Pesan dan Diskursus Praktis Habermasian, berguna untuk menyusun argumentasi peneliti dalam melihat idealisasi pers sebagai ruang publik dalam sistem demokrasi deliberatif, khususnya dalam memberitakan proses konsolidasi demokrasi.

I.4.1 Indikator Demokrasi

Dewasa ini, beberapa dasawarsa setelah "demokrasi liberal" dinyatakan sebagai pemenang di akhir sejarah-setelah rezim-rezim yang menyebut diri "demokrasi rakyat" atas nama sosialisme runtuh-orang memang makin merasa tepuk tangan itu

terlalu cepat. Makin terasa ada pintu yang tertutup. Ada suara-suara yang jadi terasing, atau tak diakui, atau tak diperhitungkan. Jurang antara "wakil" dan yang "diwakili" terasa membentang. Representasi hanya membentuk sebuah kerowak. Pintu itu harus dijebol. (Goenawan Mohamad-Catatan Pinggir)

Dalam penelitian ini istilah-istilah demokrasi dan demokratisasi dipakai bergantian. Pengertian demokrasi di sini, yang diderivasikan dari pemikiran-pemikiran banyak tokoh yang menginspirasi penelitian ini, adalah pengertian demokrasi yang radikal. Yang tidak hanya memandang demokrasi sekedar sebagai system keterwakilan politik.

Henry B. Mayo menuliskan bahwa demokrasi adalah sistem kehidupan, sekumpulan kepercayaan, yang mana masyarakat saling berbagi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut adalah proses penyelesaian konflik secara damai dan institusional, perubahan yang damai dalam masyarakat yang dinamis, pemilihan pemimpin secara berkala, minimalisasi paksaan dalam segala bidang, keberagaman, dan keadilan relative (Budiarto, 2008 : 37).

Sementara itu democracyjournal.org menunjukkan bahwa system demokrasi seharusnya menjamin sistem politik untuk memilih dan mengganti pemerintah lewat pemilu yang adil dan bebas, partisipasi aktif dari masyarakat sebagai warga Negara dalam kehidupan politik maupun kemasyarakatan, perlindungan terhadap hak-hak asasi warga Negara, serta supremasi hukum-yang mana prosedur hukum berlaku setara terhadap setiap warga Negara tanpa terkecuali (<http://www.democracyjournal.org/>).

Fareed Zakaria berargumen bahwa tidak ada negara yang mutlak demokratis, ataupun mutlak tidak demokratis. Pandangan tersebut membawa pemahaman bahwa demokratisasi adalah proses yang meliputi dua bagian. Proses transisi demokrasi,

dari negara yang kurang demokratis menuju ke negara demokratis (seperti terjadi dalam the Arab Spring), maupun proses konsolidasi dari negara yang telah mengklaim dirinya demokratis menuju ke bentuk-bentuk yang semakin ideal (seperti dalam kasus Indonesia yang diangkat dalam penelitian ini).

Tocqueville memandang bahwa kebebasan adalah kapasitas dalam membangun moralitas dalam membuat keputusan. Apapun yang mengurangi kapasitas ini, mengurangi nilai –nilai kemasyarakatan, sebaliknya, apapun yang memperluas kapasitasnya mengangkat humanitas (Pope, 1986: 52). Tocqueville tidak menyamakan kebebasan dengan absennya kontrol sosial. Asalkan penerapan kontrol berbasis kepada kepatuhan sukarela, alih-alih paksaan koersif dari kekuatan luar, maka kontrol sosial akan kompatibel dengan kebebasan.

Ia menekankan pentingnya hal-hal berikut ini dalam menjamin sistem demokrasi : agama, nilai-nilai moral, adat dan budaya, kebiasaan, formasi sosial, hukum, ide-ide, pers yang bebas dan opini publik, keterbukaan yang dipertentangkan dengan kerahasiaan dalam pemerintahan dan administrasi, lembaga peradilan yang independen dan kuat, komunitas, kelompok dan institusi sekunder, desentralisasi administrasi, otoritas, keberimbangan kekuasaan, dan faktor-faktor lain yang mengurangi koersi dan melindungi kebebasan individu (Pope, 1986: 60).

Namun Tocqueville sendiri sadar bahwa indikator-indikator tersebut bukan harga mutlak. Karena sebagai sebuah sistem universal, ia tidak dapat dipakasakan sebagai ide universal ⁴. Dalam kunjungannya ke Amerika, ia menemukan bahwa persamaan (equality) sebagai sebuah sistem ide yang melandasi semangat demokrasi, dapat berujung pada sistem sosial dan politik yang berbeda, bergantung pada jalan panjang sejarah sosial politik negara yang bersangkutan hingga sampai pada konsep

⁴ Ingat kritik Isaiah Berlin mengenai universalitas ide, yang telah dijabarkan sebelumnya.

persamaan dan kebebasan. Terlahir sebagai individu yang bebas dan egaliter, sejak awal, Amerika merasakan maksimalitas kebebasan. Dalam konteks Amerika, persamaan diasosiasikan dengan kebebasan. Sebaliknya, terkungkung dalam sistem monarki dan aristokrasi selama berabad-abad, serta warisan revolusi yang tidak bahagia dan melahirkan individualisme dan dendam bersama, alih-alih persamaan seperti didambakan, Prancis tidak melahirkan perubahan revolusioner persamaan dan kebebasan dalam sistem ide, hukum, dan norma sosial. Di negeri asalnya ini, Tocqueville menemukan bahwa persamaan berasosiasi dengan tirani (Pope, 1986: 51).

Meninggalkan Tocqueville, perbedaan tetap dapat ditemukan hingga dewasa ini ketika negara-negara dunia beralih ke sistem demokrasi. *The Arab Spring*, sebagai fenomena demokratisasi terbesar abad 21 dapat menjelaskan secara gamblang, bagaimana dampak dari transisi demokrasi dapat begitu berbeda di negara-negara yang selama berabad-abad sebelumnya "hidup dalam dunianya sendiri". Bertahun-tahun sebelumnya transisi demokrasi di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara pun penuh dengan gejolak. Lahirnya paham baru mengenai nasionalisme dan *nation-state* menggantikan nilai-nilai primordial yang dianut sebelumnya, serta tuntutan persamaan sebagai asas demokrasi yang mempertemukan kelompok-kelompok komunal yang asing satu sama lain, membuat sebuah proses transisi demokrasi menjadi tidak mudah dan rawan konflik.

Meski demikian, tuntutan akan dianutnya sistem demokrasi dalam sebuah negara semakin tak terelakkan. Ketika dunia berada di era globalisasi dan nir batas, serta sistem perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, demokrasi menjadi satu-satunya harapan untuk melindungi kebebasan individu sebagai pemuliaan humanitas dan persamaan. Karena itu perlu ada upaya untuk mengkaji sejauh mana sebuah

negara telah berkembang ke arah "demokratis" dan mengaplikasikan nilai-nilai ideal dalam rangka melindungi kebebasan warga negaranya.

Dalam rangka mengkaji proses demokrasi dan transisi demokrasi negara-negara di dunia, *Freedom House* dan *World Audit Democracy* mencoba melahirkan indeks-indeks parameter demokrasi yang dapat diaplikasikan ke banyak negara. *World Audit Democracy*, yang menempatkan Indonesia dalam peringkat negara demokratis ke 64, memiliki 4 indeks dalam melihat proses demokrasi di tiap negara. *Political Rights*, *Civil Liberties*, *Press Freedom*, dan *Corruption* (worldaudit.org). Indeks ini diterapkan secara kuantitatif yang memiliki parameter-parameter yang dapat diaplikasikan secara general di banyak negara.

Untuk *Political Rights*, parameter yang dilihat adalah apakah kepala negara atau kepala pemerintahan dipilih melalui pemilu yang adil dan bebas, sama halnya dengan legislatif. Dalam proses pemilu harus terjamin adanya hukum yang adil, kesempatan kampanye yang setara, polling yang adil, dan penghitungan surat suara yang adil dan presisi. Apakah pemilih mampu secara bebas menyatakan suaranya kepada calon representatif. Publik juga diharapkan memiliki cukup pilihan untuk berafiliasi dengan partai politik tertentu, dan tersedia sarana kompetisi di antara masing-masing partai politik. Terjaminnya kekuatan oposisi yang memadai, kekuatan oposisi secara *de facto*, dan kemungkinan yang realistis bagi oposisi untuk meningkatkan dukungan dan meraih kekuasaan lewat pemilu. Apakah masyarakat berada di bawah dominasi militer, kekuatan asing, partai-partai totaliter, hierarki religius, oligarki ekonomi, maupun kelompok kekuasaan lainnya. Apakah dibuka ruang-ruang bagi kelompok etnis, budaya, dan minoritas untuk ambil bagian dalam proses konsensus pengambilan keputusan. Apakah pemerintah, atau kekuatan yang berkuasa, secara sengaja mengubah komposisi etnis maupun wilayah dalam rangka

meruntuhkan nilai-nilai budaya atau menciptakan ketidakseimbangan politis dalam rangka dukungan bagi kelompok tertentu.

Civil Liberties, memandang bahwa beragam ekspresi kultural harus bebas dan independen. Termasuk media dan sastra (dalam kasus jika media berada di bawah kontrol negara-misal BBC-namun tetap menawarkan sudut pandang yang plural, survey *World Audit Democracy* akan memberikan sistem kredit). Apakah institusi religius bebas dari kontrol kelompok kepentingan, serta ada ekspresi religious baik publik maupun privat yang terjamin. Apakah ada kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi. Apakah ada jaminan kebebasan berpolitik. Apakah ada perserikatan dagang yang bebas, organisasi buruh tani atau yang ekuivalen, apakah ada daya tawar kolektif yang efektif. Apakah tersedia profesional-profesional bebas dan organisasi privat (termasuk di dalamnya partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga ad hoc, dan sebagainya). Apakah ada sistem peradilan yang independen. Apakah tatanan hukum berlaku bagi permasalahan sipil dan kriminal. Apakah populasi masyarakat mendapat perlakuan yang setara di bawah hukum. Apakah polisi mendapat kontrol dari masyarakat sipil.

Apakah ada proteksi dari teror politis dan pemenjaraan yang tidak adil, pengasingan maupun penyiksaan, baik dari kelompok pendukung maupun oposan sistem. Serta bebas tidaknya masyarakat dari perang dan situasi pemberontakan. Apakah ada kebebasan dari pemerintahan ekstrem yang menyimpang dan korupsi. Apakah diskusi publik terbuka maupun diskusi privat terjamin keamanannya. Apakah ada otonomi personal. Hal ini mencakup kebebasan untuk bepergian (*travel/mobilize*), pilihan untuk bertempat tinggal, pilihan untuk mencari pekerjaan. Termasuk juga kebebasan dari indoktrinasi dan ketergantungan yang eksektif dari negara. Apakah hak-hak properti aman. Apakah masyarakat memiliki hak untuk

mendirikan bisnis privat. Apakah aktivitas privat memiliki otonomi dari pengaruh pemerintah, tekanan keamanan, dan kelompok-kelompok kriminal. Apakah ada kebebasan bagi kehidupan privat personal sosial, termasuk kesetaraan gender, pilihan untuk mencari partner menikah, dan jumlah anggota keluarga. Apakah ada kesempatan yang setara untuk berbagi legitimasi pemenuhan ekonomi termasuk ketergantungan dari tuan tanah, pekerja, serikat buruh, birokrat dan berbagai rintangan lainnya.

World Audit Democracy membuka penjelasan mengenai indeks *Press Freedom*, dengan klausul dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media regardless of frontiers (Declaration of Human Rights, article 19)". Dalam mengkaji kebebasan pers di 194 negara mereka menggunakan tiga indikator utama, yakni *the legal environment, the political environment, and the economic environment*.

Legal Environment, melingkupi baik eksaminasi hukum dan regulasi yang memungkinkan timbulnya pengaruh terhadap media, maupun kecenderungan pemerintah untuk menggunakan hukum-hukum ini dan institusi legal dalam rangka mengekang kemampuan media untuk beroperasi. Proses eksaminasi mencakup dampak positif dari jaminan legal konstitusional untuk kebebasan berekspresi, aspek negatif potensial dari keamanan legislasi, undang-undang pidana dan statuta kriminal lainnya, pinalti untuk pencemaran nama baik dan fitnah, kemampuan untuk menggunakan legislasi kebebasan informasi, independensi dari badan peradilan dan pekerja media, surat ijin usaha penerbitan maupun regulasi yang dibutuhkan untuk

menerbitkan produk media, serta kemampuan para jurnalis untuk beroperasi secara bebas.

Political Environment. Indikator ini mengevaluasi tingkat kontrol politik terhadap isi media. Termasuk independensi editorial baik terhadap media yang dimiliki negara maupun privat, akses terhadap informasi dan narasumber, proses sensor baik ekstra maupun intra media, kemampuan baik wartawan lokal maupun asing untuk meliput berita secara bebas dan tanpa intimidasi, ada tidaknya detensi dan penahanan arbitrer, kekerasan dan ancaman lainnya.

Economic Environment. Indikator ini melihat struktur kepemilikan media. Seberapa transparan dan ada tidaknya konsentrasi kepemilikan, berapa besar biaya yang diperlukan untuk mendirikan media, termasuk juga ongkos produksi dan distribusi, proses selektif menahan pengaruh iklan maupun subsidi dari pemerintah atau aktor lainnya, dampak dari korupsi dan penyuapan terhadap konten media, serta dampak berkelanjutan dari situasi ekonomi negara terhadap perkembangan media.

Corruption. Harian Kompas pertengahan tahun 2011 menurunkan laporan bahwa 17 dari total 33 gubernur di Indonesia, tersangkut kasus korupsi. Kenyataan bahwa separuh lebih provinsi di Indonesia dipimpin oleh kepala daerah bermasalah, sungguh sangat ironis. Korupsi bukanlah hal yang musykil terjadi ketika politik uang menjadi kewajaran dalam praksis politik di Indonesia. Beetham, dalam Rice dan Bartlett, berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa merasa benar-benar "aman" dalam pemilihan memperebutkan posisi mereka, tanpa support dari para pemilih (Rice & Bartlett, 2006: 275). Dengan latar belakang disparitas karakteristik pemilih, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan sebagainya, mendorong politisi lebih memilih menggunakan uang sebagai jalan pintas. Indra J. Piliang menceritakan dalam bukunya "Mengalir Meniti Ombak: Memoar Kritis Tiga

Kekalahan”, bahwa dalam upaya suksesnya mendukung pencalonan legislatif di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II, hingga April 2009 ia mengaku mengeluarkan lebih dari Rp 1 miliar. 300 juta di antaranya, berasal dari kas pribadi (Kompas, 20/3/2012). Effendi Gazali, pakar komunikasi politik Indonesia, mengutip politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, berujar bahwa pernah angka Rp 1,2 triliun dihabiskan dua kandidat pada suatu pilkada. Dengan masa jabatan ”hanya” lima tahun, dan gaji yang “tidak sebanding”, tentu kita mahfum jika sepanjang menjabat, kepala daerah akan memutar otak habis-habisan untuk mengembalikan modal. Korupsi maupun politik dagang sapi menjadi satu-satunya cara.

“Prestasi” ini mendudukan Indonesia pada posisi ke 77 negara terkorup di dunia dari total 180 negara, versi World Audit Democracy. Korupsi adalah penyakit kronis di Indonesia. Penyakit yang mulai menjangkit dalam wujud oligarki Orde Baru, tidak mampu dicerabut tuntas oleh reformasi yang hanya merombak sistem kontestasi politik, namun tidak berusaha mengkritisi sistem perekonomian liberal yang sering dipandang tidak selaras dengan karakter bangsa Indonesia. Seniman Sudjiwo Tejo dalam suatu perhelatan Jakarta Lawyers Club pernah berujar bahwa koruptor Indonesia layak dihukum mati karena kejahatan yang jauh lebih besar dari pelaku pembunuhan. Ia membunuh secara massal, semacam genosida, namun secara perlahan. Permasalahan akut yang belum mampu dituntaskan karena telah begitu sistemik dan mengakar.

Secara filsafat, Kompas (12/3/2011) berusaha untuk tidak mereduksi pengertian korupsi sebatas pada tataran ekonomi. Korupsi diartikan sebagai perilaku penyelewengan oleh manusia, sehingga mencegah terciptanya *bonnum commune* dalam kehidupan masyarakat. *Bonnum Commune* adalah situasi dalam masyarakat sosial, di mana masing-masing agen/ anggota mendayagunakan dan memperdayakan

yang terbaik dari dirinya, agar tercipta kehidupan bersama yang baik. Mereduksi korupsi hanya dalam tataran perilaku ekonomis adalah naif. Sebagai contoh plagiarisme pun bisa dipandang sebagai tindak korupsi. Plagiarisme adalah penyelewengan terhadap etika pendidikan. Korupsi menjadi musuh utama demokrasi, karena keserakahan salah satu pihak, mematikan kebebasan manusia lain untuk berpartisipasi membentuk ruang diskursus demokrasi, baik secara sosial politik, maupun ekonomi.

Political Rights, Civil Liberties, Press Freedom, dan *Corruption* bisa menjadi sintesa jalan tengah dalam melihat proses demokrasi dan demokratisasi di negara-negara yang sangat beragam. Keberagaman masing-masing indikator, mereduksi kemungkinan universalisasi ide oleh kelompok tertentu, yang terkadang atas nama demokrasi, justru mendelusionalisasinya dan membungkam kebebasan individu.

1.4.2. Snyder dan Konflik Dalam Demokratisasi

Demokrasi sebagai keyakinan hidup, kekal dalam diri setiap orang. Maka, tak perlu determinasi agama atau kultural untuk mengekalkan "agenda demokratisasi" yang tak demokratis. Juga tak perlu berlindung di balik dalil "perang melawan terorisme" untuk mengekalkan kepentingan ekonomi-politik global (Boni Hargens, Kompas 12/01/2012).

Nasionalisme sering dipandang sekedar sebagai rasa cinta negara atau bela negara. Melalui riset sejarah yang luas, Anthony Smith membedakan antara kelompok SARA atau *ethnie*, sebagai kelompok yang menyadari kekhasan mereka sendiri berdasarkan kesamaan bahasa atau budaya, mitos tentang nenek moyang bersama, atau pengalaman sejarah yang sama, dengan bangsa atau *nation* yang memperjuangkan pemerintahan sendiri untuk kelompok mereka. Berdasarkan

pemahaman tersebut, Jack Snyder, ilmuwan politik terkemuka di bidang demokratisasi, memiliki definisi komprehensif mengenai nasionalisme, yakni doktrin bahwa rakyat yang memandang diri sendiri berbeda karena budaya, sejarah, lembaga, atau prinsip-prinsip, seharusnya memerintah diri sendiri dalam suatu sistem politik yang mencerminkan dan melindungi perbedaan itu. Dengan demikian suatu bangsa (*a nation*) adalah sekelompok orang yang merasa khas dalam berbagai bidang tersebut dan karena itu menghendaki pemerintahan-sendiri (*aspire to self-rule*) (Snyder, 2000: 13-14).

Nasionalisme, merupakan faham baru di dunia modern yang turut berkembang pasca Pencerahan. Sebelum penggalan akhir abad ke-18, dinasti dan imperium berhasil memerintah rakyat yang pasif secara politis, dan menikmati cukup banyak surplus ekonomi mereka untuk mengongkosi tentara bayaran atau bangsawan bersenjata. Penguasa jarang mendaku bahwa mereka memerintah demi kemakmuran rakyat. Tidaklah menjadi soal pada masa itu bahwa raja dan rakyat sering berbicara demi kepentingan dan mengampu identitas nasional yang berbeda. Namun di abad pencerahan, abad lahirnya gagasan-gagasan, dan era revolusi industri yang melahirkan kapitalisme niaga, hal ini berubah. Ketika kekayaan yang berasal dari perdagangan, dan kemudian dari industri, makin menyebar dalam masyarakat, negara-negara yang paling berhasil adalah yang bisa meyakinkan masyarakat dagang mereka untuk membayar pajak atau mau meminjamkan kekayaan mereka kepada negara (Snyder, 2000: 40). Para penguasa dan elite-elite yang menginginkan kekuasaan, akan unggul dalam persaingan selama bisa mendapatkan dukungan rakyat yang mulai terbuka.

Sentimen nasionalis menjadi senjata utama para demagog, para elit yang mengipaskan identitas kolektif sebagai pemicu keterdukungan publik terhadap

itikadnya. Selama masa awal demokratisasi, bertambahnya kebebasan menyatakan pendapat seringkali memperkuat rekayasa mitos nasionalis dan konflik SARA, karena golongan elite pemerintah maupun non-pemerintah yang oportunis memanfaatkan setengah monopoli atas pasokan, permintaan yang tersegmentasi, dan kelemahan lembaga-lembaga regulasi, di pasar gagasan. Semakin tidak sempurna pasar (artinya semakin kuat kedudukan para penguasa media separuh monopoli yang saling bersaing, semakin banyak jumlah segmentasi konsumen, serta semakin tergantung dan berat sebelah media massa), maka akan semakin besar kemungkinan bagi rekayasa mitos nasionalis untuk menguasai wacana publik dan untuk memperluas konflik.

Pengalaman Jerman merupakan pelajaran berharga. Selama masa Republik Weimar, yang berdiri setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, kalangan industri yang berkedudukan kuat mengerahkan dana dan tenaga untuk mencekoki para pembaca di kota-kota kecil dengan berita-berita berbau nasionalis dalam upaya menggalang pendukung di kalangan kelas menengah agar rela membela tatanan kapitalis terhadap kelas pekerja. Alfred Hugenberg, misalnya, yang merupakan ketua dewan direktur perusahaan *Krupp Steel* selama Perang Dunia I dan ketua Partai Rakyat Nasional Jerman selama Republik Weimar, mendirikan kantor berita *Uni Telegraf*, yang memberinya kesempatan mengendalikan separuh dunia pers Jerman. Ia memasok berita-berita yang seragam, sembari mencekoki keseragaman gagasan yang berbau nasionalis, sembari tetap mempertahankan kesan sebagai pers yang bebas (Snyder, 2000: 57). Cara yang sama digunakan Hitler beberapa tahun kemudian. Hitler mencapai posisi dominan di *Reichstag* (Parlemen) hanya dengan sepertiga dari jumlah seluruh suara, dan ia memanfaatkan posisi tersebut sebagai batu loncatan untuk merebut media dan kekuasaan negara dengan cara-cara yang tak

konstitusional (Snyder, 2000: 59). Memonopoli satu segmen pasar sudah cukup untuk memperoleh hasil yang menentukan dalam suatu masyarakat yang terpecah belah.

Kelompok-kelompok terpilih, kelompok elite yang memainkan peranan utama dalam pembentukan gagasan-gagasan dan lembaga-lembaga nasionalis, berusaha merumuskan identitas nasional sedemikian rupa sehingga mencerminkan kepentingan dan kebiasaan mereka. Wawasan-wawasan yang bersaing dalam pembentukan identitas nasional itu biasanya mencerminkan perbedaan kepentingan atau cara pandang berbagai kelompok yang sama-sama berusaha mengobarkan sentimen nasionalis. Seperti nasionalisme Amerika versi Konfederasi Agraris pemilik budak, lawan nasionalisme Amerika versi Utara yang sedang dalam proses industrialisasi dengan buruh bebas. Di Asia Tenggara kita juga mengalami bagaimana negara-negara serempak meraih kedaulatan dan kemerdekaan dalam waktu berdekatan, dengan rumusan nasionalisme yang berbeda-beda. Sukarno, Lee Kuan Yee, dan Ferdinand Marcos, memiliki rumusan nasionalisme mereka sendiri yang diimplementasikan dalam proses demokratisasi negara.

Snyder membedakan nasionalisme ke dalam empat jenis. SARA, sipil, revolusioner, dan kontra-revolusioner. Kecenderungan penelusuran jalan yang berbeda menuju demokratisasi sangat berdasarkan sifat imbauan (*appeal*) masing-masing untuk mencapai kemaslahatan kelompok, kriteria yang digunakan untuk jadi anggota dalam kelompok, kuat lenturnya kepentingan, serta kuat tidaknya lembaga-lembaga politik. Selain itu yang sangat berpengaruh pula terhadap perkembangan nasionalisme suatu negeri selama demokratisasi adalah tingkat dan saat (*timing*) perkembangan sosio-ekonominya (Snyder, 2000: 73). Negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita tinggi, cenderung memiliki kelas menengah dalam jumlah

yang besar, serta tingkat melek-huruf yang tinggi pula, yang sangat berperan dalam proses demokratisasi. Sifat nasionalisme yang paling mungkin dipilih adalah nasionalisme sipil, yang paling inklusif dan menyebabkan konflik paling ringan di antara masyarakat. Sebaliknya dalam sebuah negara dengan tingkat pendapatan per kapita rendah, rakyat tidak mapan secara ekonomi, dan kurang teredukasi, jaringan patronisasi dan majikan-bawahan masih kental terasa. Belum ada pemahaman komprehensif yang inklusif mengenai kewargaan (*civic society*) yang didasarkan atas kesetaraan hak-hak dan kewajiban, walaupun ada masih lemah, sehingga masih mungkin dimanfaatkan oleh kaum elite untuk dikembalikan kepada pemahaman primordial dan tribalisme. Sentimen nasionalisme SARA, revolusioner, maupun kontra-revolusioner dengan potensi konflik berdarah-darah di tengah masyarakat sangat dimungkinkan terjadi.

Nasionalisme Sipil, ditandai dengan kepentingan elit yang lentur dan dijamin oleh lembaga politik yang kuat. Nasionalisme sipil sangat mungkin timbul bila golongan elite tidak merasa terlalu terancam dengan terbentuknya sistem demokratis, dan bila lembaga-lembaga perwakilan serta pers yang perlu bagi tegaknya demokrasi sudah cukup berfungsi pada masa awal transisi menuju demokrasi. Imbauan demi mencapai kemaslahatan bersama didasarkan pada loyalitas terhadap seperangkat ide-ide dan lembaga-lembaga politik yang dianggap adil dan tangguh. Seseorang diterima atau ditolak sebagai anggota kelompok ini terutama tergantung pada apakah orang itu lahir atau bertempat tinggal lama di wilayah bangsa tersebut.

Negara-negara yang sudah sejak dini mengembangkan perekonomian dan sistem politik mereka, seperti Britania Raya, mendapatkan dua kelebihan yang memudahkan mereka melewati masa transisi ke demokrasi dan meningkatkan peluang mereka untuk membentuk nasionalisme sipil. Pertama, golongan elite

mereka sedikit-banyak tidak terancam oleh proses demokratisasi karena punya banyak persamaan kepentingan niaga dengan kelas menengah yang baru timbul. Kedua, dalam pola perkembangan Britania masa awal, koalisi dinamis di bidang ekonomi antara saudagar dan elite tuan tanah sangat berkepentingan dengan makin kuatnya lembaga-lembaga perwakilan dan kebebasan berbicara, yang melindungi mereka terhadap tindakan raja yang sewenang-wenang. Dengan demikian, lembaga-lembaga liberal menjadi kuat di kalangan elite sebelum masyarakat luas mulai memainkan peranan penting di dalam politik. Jika kepentingan elite dapat disesuaikan, dan lembaga-lembaga liberal ada sebelum maraknya politik massa, nasionalisme memiliki kemungkinan mengambil sifatnya yang sipil dan inklusif (Snyder, 2000: 79).

Amerika yang sejak mula telah menyadari posisinya sebagai negeri para imigran, tidak mampu mendasarkan nasionalisme pada identitas primordial. Sebaliknya mereka mendasarkan sentimen nasionalisme pada semangat multikulturalisme dan kesetaraan. Ketika Lincoln menggalang kekuatan Union untuk menggempur 11 *states* yang memisahkan diri dan membentuk konfederasi, ide yang dibangun Lincoln pun ide akan kesetaraan dan abolisionis, serta usaha mempersatukan industrialisasi Amerika yang terhambat di Selatan akibat kentalnya budaya aristokrasi.

Nasionalisme SARA, kepentingan elite yang tegar, dengan lembaga politik yang lemah. Dalam bentuk yang ekstrem berupa perkembangan ekonomi yang tertinggal, ketika lembaga-lembaga negara masih baru pada saat timbulnya desakan ke arah peran serta politik massa, nasionalisme SARA sangat mungkin lahir. Karena kurang tersedia lembaga-lembaga demokrasi atau pemerintahan yang berfungsi baik untuk mendekatkan warga negara ke negara, tidak ada pilihan bagi pemimpin politik

selain menggalang kesetiaan lewat ikatan-ikatan kultural. Imbauan nasionalis didasarkan pada budaya, bahasa, agama, pengalaman bersama, mitos nenek-moyang bersama, dan mereka menggunakan semua wawasan tersebut sebagai kriteria untuk menerima atau menolak seseorang sebagai anggota kelompok nasionalis tersebut. Begitu aliran politik berimpit dengan kesetiaan budaya tertentu, maka terciptalah keadaan di mana kepentingan-kepentingan menjadi tegar kaku sedang lembaga-lembaga lemah. Benar-benar merupakan sebuah kebalikan dari keadaan yang melahirkan nasionalisme Sipil.

Apa yang terjadi di Serbia, Estonia, dan sebagian besar konflik Balkan merupakan contoh nyata nasionalisme SARA. Sentimen ini juga dapat menjelaskan konflik primordial dalam masa transisi demokrasi di Myanmar. Sebelumnya di era junta militer, demi menjamin stabilisasi sosial-politik, sentimen primordial justru dilibas. Namun ketika keran-keran kebebasan mulai dibuka, dengan lembaga-lembaga politik liberal yang belum mapan, serta situasi ekonomi yang belum stabil, muncul keengganan-keengganan untuk berbagi hak dengan kelompok minoritas SARA. Terbukti bahwa kasus Rakhine dimulai oleh kasus kriminal belaka, yang berhasil dikompromi dan dipanaskan dengan sentimen primordial secara masif oleh kalangan elit, baik politisi maupun agamawan. Indonesia juga mengalami permasalahan serupa di era pemerintahan Abdurrahman Wachid. Konflik separatis, SARA, pertikaian antar golongan terjadi di kantong-kantong daerah. Indonesia saat itu belum siap menerima limpahan kebebasan sosial politik yang dibuka keran demokrasi. Akibatnya kepentingan elit lebih banyak berbicara.

Nasionalisme Revolusioner, kepentingan elite yang lentur, dengan lembaga politik yang lemah. Dalam pola lain pembangunan yang terbelakang, lembaga-lembaga untuk peran serta yang demokratis bisa tertinggal dibandingkan dengan

tuntutan penduduk yang telah tergugah secara politis. Dalam keadaan ini, seperti pada masa Revolusi Prancis, para elite yang dapat menyesuaikan diri demi kepentingan mereka, bisa berpendapat bahwa imbauan nasionalisme yang bersumber dalam anggapan tentang persekongkolan asing, merupakan cara paling ampuh untuk mengukuhkan kembali wibawa pemerintah di tengah runtuhnya lembaga-lembaga pemerintahan. Karena wibawa bertumpu pada ideologi nasionalis, dorongan untuk terkemuka dalam menyerukan perang demi keselamatan nasionalis menjadi sangat kuat, dan sejalan dengan itu konflik nasionalis memuncak.

Propaganda didasarkan pada upaya mempertahankan revolusi politik yang telah membawa suatu rezim baru ke puncak kekuasaan, yang memerintah atas nama bangsa, dan mengucilkan mereka yang dianggap berupaya membalikkan perubahan itu. “Gerakan Bersih” yang sempat marak mewarnai dinamika politik Malaysia pertengahan tahun 2011 merupakan contoh nasionalisme revolusioner, sebagai bentuk kritik terhadap reformasi politik dan demokrasi yang ternyata tidak diperkuat oleh lembaga-lembaga politik yang kokoh sehingga digerogeti oleh penyakit korupsi.

Nasionalisme Kontra Revolusioner, kepentingan elit yang tegar, dengan lembaga politik yang kuat. Golongan elite yang terancam oleh proses demokratisasi, tetapi masih mengendalikan pemerintahan sering tergoda menggunakan nasionalisme eksklusif untuk membatasi tanggung jawab demokratisnya, sementara mereka pura-pura tampil sebagai pemimpin rakyat demi mempertahankan kedaulatan nasional. Dalam keadaan seperti itu, doktrin nasionalis bisa sekaligus mengucilkan kelas sosial, golongan SARA, yang dicap musuh bangsa, di satu pihak, dan di pihak lain mengganyang bangsa asing yang membantu musuh-musuh di dalam negeri.

Propaganda didasarkan pada perlawanan terhadap faksi-faksi internal yang berupaya merongrong lembaga-lembaga tradisional bangsa tersebut. Mereka mengucilkan kelas sosial, agama, kelompok budaya, atau penganut semua ideologi politik yang menurut kriteria tersebut dianggap "musuh-musuh bangsa".

Demikianlah pada 1870-an kanselir Jerman, Otto von Bismarck, mencap buruh, kaum sosialis, Katolik, dan orang Polandia sebagai musuh-musuh bangsa Jerman sejati. Sama halnya dengan para pemimpin Komunis di Rumania, Slovakia, dan Serbia, dengan beragam tingkat keberhasilan dalam memadukan imbauan-imbauan berbau SARA dan kelas sosial sebagai strategi nasionalisme eksklusif. Dalam proses transisi demokrasi terbesar abad 21, *The Arab Spring*, pemimpin-pemimpin negara Arab, macam Moammar Ghadafy, Bahar al-Assad, dan lain-lain banyak memakai sentimen ini dalam rangka menolak tiupan angin demokrasi yang mereka tuding "tunggangan Barat".

Di Indonesia, Sentimen ini ditiupkan tiap kali daerah bergejolak. Papua Barat, Aceh, Ambon, dan sebagainya. Empat pilar kebangsaan dan keutuhan NKRI akan selalu menjadi jargon utama untuk menolak segala macam gesekan sosial politik di daerah. Sekalipun terkadang penyebab timbulnya gesekan tersebut adalah akumulasi kekecewaan daerah terhadap pusat, namun elit pusat yang tak ingin terancam posisinya dengan desentralisasi yang adil dan mapan, akan meniupkan sentimen ini dengan alasan kesatuan dan keutuhan negara, sembari menutupi kepentingan yang sebenarnya.

Snyder berujar bahwa kategori di atas merupakan tipe-tipe ideal saja. Banyak contoh nyata terletak di wilayah abu-abu antara tipe-tipe sentimen nasionalis tersebut. Dalam contoh nyata yang kompleks, propaganda nasionalis, pengucilan-

pengucilan, dan konflik yang timbul bisa merupakan campuran tipe-tipe ideal tersebut.

Untuk kasus Indonesia, meminjam teori sentimen nasionalis versi Snyder tentu sangat berguna. Pengalaman masa lalu menunjukkan proses demokratisasi tak mapan berbuah konflik sporadis di daerah-daerah. Sedangkan di masa sekarang, proses konsolidasi politik desentralisasi masih rawan ditunggangi kepentingan elit. Kerusuhan yang selalu timbul mengiringi proses pemilihan kepala daerah, isu-isu separatis yang kembali menguat, akumulasi kekecawaan terhadap sentralisasi ekonomi pusat, terorisme, semuanya menunjukkan proses demokratisasi di daerah-daerah di Indonesia masih mutlak membutuhkan analisa dan pengawasan. Dengan mengetahui prevalensi sentimen nasionalis yang berkembang, diharapkan pemutusan mata rantai dan aksi reaktif dapat berjalan efektif.

1.4.3. Produksi Pesan dan Diskursus Praktis Habermasian

1.4.3.b Produksi Pesan Media

Kebebasan pers, baik yang *das solen* maupun *das sein*, tentu merupakan sebuah *anchor* yang mutlak diperlukan dalam membangun jejaring informasi publik dalam sistem demokrasi. Namun kenyataannya, ada beragam keterikatan dan pengaruh-pengaruh eksternal maupun internal yang berdampak terhadap produksi pesan media. Beberapa kasus di atas menggambarkan situasi pers yang bebas, namun dikooptasi demi kepentingan elitis, sehingga-meminjam istilah Agus Sudbiyo-reotoritarianisasi dan rekapitalisasi membuat kebebasan pers hanyalah sebuah kebebasan semu (Sudibyo, 2009: 3-36)

Bagaimanakah menjelaskan isi media, di luar aspek kebebasan pers? Ada tiga pendekatan yang terangkum dalam buku Brian McNair (1994), pendekatan ekonomi-

politik (*political-economy approach*), pendekatan organisasi (*organisational approach*), dan pendekatan kultural (*cultural approach*) (McNair, 1994: 39-58).

Pertama, pendekatan ekonomi-politik. Pendekatan ini berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Mekanisme produksi berita dilihat sebagai bagian integral dari relasi ekonomi dalam struktur produksi. Pola dan jenis pemberitaan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang secara dominan menguasai pemberitaan. Seperti faktor kepemilikan dan kapitalisasi.

Kedua, pendekatan organisasional. Pendekatan ini memandang pemilik media, dan aspek pengelolaan intra institusi media menjadi faktor utama penentu isi pesan. Berita dilihat sebagai hasil interaksi di dalam ruang redaksi. Praktik kerja, profesionalisme, dan tata aturan yang ada dalam organisasi adalah faktor-faktor dinamik yang memengaruhi pemberitaan. Otonomi media, nilai-nilai berita, serta pertimbangan redaktur, menjadi faktor penentu utama pembentukan pesan media.

Ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan ekonomi-politik dan pendekatan organisasi. Proses produksi berita dilihat sebagai mekanisme yang rumit yang melibatkan faktor internal media (rutinitas organisasi media) sekaligus juga faktor eksternal di luar diri media. Mekanisme yang rumit itu ditunjukkan dengan bagaimana perdebatan yang terjadi dalam ruang pemberitaan, Media pada dasarnya memang mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi, tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik di luar diri media.

Dalam pendekatan kulturalis, pengaruh kekuatan ekonomi politik dominan dalam pemberitaan itu diyakini tidak bersifat langsung. Dalam banyak kasus, justru

sering tidak disadari oleh para wartawan. Wartawan menganggap beritanya objektif, berimbang, dan dua sisi. Padahal secara tidak langsung berita tersebut justru membantu melanggengkan kekuatan ekonomi-politik yang dominan.

Melengkapi pendekatan-pendekatan di atas, Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, mengemukakan teori lingkaran keterikatan (sering disebut juga sebagai teori lingkaran donat), yang memengaruhi kebijakan redaksional dan pengambilan keputusan di dalam *newsroom* (Reese & Shoemaker, 1996)

Pertama, faktor individual (*individual constraint*). Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Latar belakang individu, seperti jenis kelamin, usia, suku, agama, preferensi politik, dan lain-lain, memengaruhi bagaimana seorang jurnalis menangkap suatu peristiwa, dan merepresentasikannya kembali lewat media. Wartawan beragama Islam melihat konflik Palestina-Israel dengan sudut pandang yang berbeda dari wartawan berkebangsaan Amerika. Wartawan perempuan akan memandang kasus pemerkosaan berbeda dengan wartawan laki-laki.

Kedua, faktor rutinitas media (*media routine constraint*). Level ini berhubungan dengan mekanisme organisasi dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya memiliki ukuran tersendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita baik, atau kriteria berita layak angkat cetak. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas ini juga berhubungan dengan bagaimana berita dibentuk. Dalam peliputan sebuah peristiwa penting, bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, siapa penulis, siapa editor, sebelum naik cetak tulisan harus melalui berapa meja, dan seterusnya. Sebagai sebuah keterikatan yang mengatur

mekanisme roda produksi setiap hari, posisi rutinitas media menentukan wujud akhir sebuah berita.

Ketiga, faktor organisasi (*organizational constraint*). Pengelola media dan wartawan hanyalah bagian kecil dari lingkaran organisasi media. Di dalamnya masih ada otoritas yang lebih tinggi, seperti pemilik, pemegang saham, maupun yang secara laten juga memiliki pengaruh dalam *output* redaksi yakni bagian perusahaan dan sirkulasi. Masing-masing bagian sering tidak sejalan. Masing-masing divisi memiliki visi dan filosofinya masing-masing. Sebagai contoh di awal reformasi, mendadak pemberitaan media penuh berisi kritik politis. Selain karena kebebasan pers yang direguk redaksional media kala itu, bagian perusahaan juga mampu membaca prevalensi *market share* sedang meminati berita demikian. Sayangnya di era pasca reformasi, kecenderungan *market regulation* ini terus berlanjut, bahkan terkadang kebalasan, membuat media cenderung membuat berita yang sekedar *profitable* tanpa memerhatikan kedalaman dan kualitas.

Keempat, faktor ekstra media (*extra media constraint*). Faktor keempat berbicara bagaimana proses produksi dipengaruhi pula oleh entitas-entitas di luar organisasi media. Antara lain, sumber berita, sumber penghasilan media, serta pemerintah dan lingkungan bisnis. Sumber berita bukanlah entitas netral, yang bebas kepentingan dalam berbagi informasi kepada wartawan. Ia akan memberikan informasi yang sekiranya baik bagi dirinya, dan mengembargo kemungkinan ancaman bagi dirinya. Sumber penghasilan media, seperti pengiklan dan pelanggan juga turut berpengaruh. Hal ini menjelaskan mengapa secara "halus" muncul halaman *advertorial* atau lebih diperhalus lagi menjadi *infotorial*. Terakhir, pemerintah dan lingkungan bisnis. Di negara-negara tertentu, negara masih menjadi otoritas penentu lisensi ijin penerbitan. Aras politik negara tentu menjadi

pertimbangan utama produksi berita demi mempertahankan lisensi. Atau *state-run* media, macam BBC, yang tentunya cenderung *favorable* terhadap kebijakan negara. Lingkungan bisnis pemilik, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya juga membawa pengaruh. Seperti dipraktikan oportunis pemilik media di Indonesia, yang menggunakan medianya sebagai ajang promosi partai, atau bahkan perusahaannya.

Kelima, faktor ideologis (*ideological constraint*). Sekalipun China kini menerapkan apa yang dikenal sebagai kapitalisme negara, dengan mempraktikan demokrasi sosio-liberal secara terbatas, namun kebebasan pers masih sulit diraih. Hal ini berhubungan dengan ideologi komunis yang melandasi kehidupan sosial-politik China, sehingga disparitas ide dan pemikiran sangat dibatasi. Sebaliknya di Indonesia, ragam pemikiran komunisme justru diberangus dan diharamkan tersebar di media, dengan alasan yang sama, yakni preferensi ideologi.

Kelima lingkaran pengaruh yang dikemukakan Reese & Shoemaker di atas menunjukkan kebebasan pers bukanlah faktor tunggal dan otonom dari keterikatan lainnya, yang membawa pengaruh terhadap produksi berita. Bahkan terkadang kebebasan pers mengonsolidasikan dan menguatkan satu aspek tertentu, yang pada akhirnya tetap menciptakan “kesemuan” sebuah kebebasan.

Sebagai contoh, kebebasan pers yang diraih pasca reformasi, adalah bagian dari transformasi liberalisme ekonomi global, yang memungkinkan ekspansi dan akumulasi modal. Kebebasan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal demi pembentukan *publik sphere* mutakhir yang diidamkan selama era Orde Baru, sebaliknya pers justru semakin terkungkung dalam kontrol rezim baru, yakni *the invisible hand market regulation*. Liberalisasi ekonomi yang secara signifikan

menambah kuantitas media ⁵, tidak membawa sifat kompetitif media, yang memberi aksesibilitas pluralitas informasi kepada masyarakat demi jaminan demokratisasi yang produktif. Sebaliknya media melulu bersaing menjual banalitas yang menghibur (namun minim pencerahan) agar dapat bersaing di bursa informasi.

Bagaimanakah seharusnya media, pers khususnya, secara ideal menyikapi anugerah kebebasan agar dapat secara produktif membangun ruang publik deliberatif dalam sistem demokrasi?

1.4.3.b Meminjam Habermas

Saya meminjam pendekatan Habermasian untuk melengkapi argumentasi mengenai peran dan tanggung jawab pers sebagai *the fourth estate*.

Berbicara mengenai *The Last Modernist*, kita selalu mengacu kepada Anthony Giddens, yang dengan teori strukturasi, mempertahankan mazhab yang berkembang sejak era Descartes ini. Meski demikian, saya berpendapat bahwa jauh lebih menarik untuk menyimak dan mendalami pemikiran Jurgen Habermas, yang sekalipun disejajarkan dengan kaum postmodern lain, tetap mengamini pemikiran modernis.

Habermas adalah penerus Mazhab kritis Frankfurt pasca Adorno, Horkheimer, Benjamin, dan Marcuse. Ia mempertahankan universalisme Kantian

⁵ Data dari Merlyna Lim, peneliti dari Arizona State University, mengungkapkan, jumlah media cetak hingga Maret 1999 sebanyak 289 buah. Satu dekade kemudian angka ini telah melonjak menjadi 1.076 buah (Kompas, 13/2/12). Tahun 2011, terhitung jumlah surat kabar saja mencapai 411 buah. Menurut data yang dimiliki Dewan Pers mengenai pers di Indonesia, sampai pada Februari 2011 terdapat setidaknya 952 terbitan media cetak di Indonesia, baik lokal maupun nasional. (Sutrisno, 2011).

dan rasionalitas sebagai poin utama. Yang ia tolak mentah-mentah adalah filsafat subyek, dimana individu dan subyektivitas menjadi *raison d'être* dari segala pemikiran (Honneth dalam White (ed.), 1995 : 280). Alih-alih, habermas menyerukan perlunya komunikasi reflektif yang terwujud secara intersubyektif, dalam menentukan rasionalitas nilai dan norma sosial. Sebagai seorang modernis, ia menegaskan perlunya rasionalisasi atas legitimasi nilai. Sebagai seorang postmodernis, ia menolak subyektivitas sebagai penentu legitimasi. Sebaliknya ia mengedepankan konsensus dan partisipasi aktif semua partisipan *locus* masyarakat.

Dalam salah satu manifestonya, *Theories des kommunikativen Handelns*, ia mengembangkan lebih jauh konsep *Lebenswelt* (dunia-kehidupan) -yang sudah lama dikembangkan dalam fenomenologi Edmund Husserl, ke dalam sebuah konsep Etika Diskursus (*Diskursethik*). Ia mengedepankan dua praktik diskursus, teoretis (*Wahrheitsanspruch*), dan praktis (*Richtigkeitsanspruch*). Jika yang pertama mempermasalahkan kebenaran klaim-klaim dan pernyataan teoretis-empiris, dalam diskursus praktis, lewat tindakan komunikatif reflektif, dipertanyakan ketepatan klaim-klaim dan pernyataan normatif, agar tercapai sebuah konsensus yang legitim (Hardiman, *op.cit* : 47).

Diskursus sendiri sebagai bentuk refleksi dari tindakan komunikatif, melandasi seluruh pola berpikir Habermas kemudian. Diskursus dipertentangkan dengan komunikasi naif, dimana seluruh partisipan komunikasi begitu saja mempertukarkan klaim kesahihan informasi. Lewat diskursus, orang bertanya, mengapa A? Mengapa B? Mengapa syariat Islam harus ditegakkan? Mengapa calon presiden D adalah yang terbaik? Partisipan komunikasi diminta mengeksplisitkan klaim-klaim kesahihan yang dikeluarkan dalam tindakan komunikatif-yang

sebelumnya diandaikan begitu saja. Pemberian penjelasan dan alasan mutlak diperlukan (Moon dalam White (ed.), 1995: 150).

Lebih lanjut, logika sederhana dari diskursif praktis dalam hidup sehari-hari adalah, sebuah konsensus yang legitim yang seharusnya dipatuhi oleh semua orang juga membutuhkan persetujuan semua orang. Atau jika dielaborasi lebih lanjut, konsensus yang diproyeksikan terapkan bagi khalayak luas, harus mampu merepresentasikan masing-masing partisipan dalam locus dimana konsensus tersebut diterapkan.

Logika diskursif praktis Habermasian ini saya gunakan sebagai acuan untuk mengkaji media sebagai *the fourth estate*. Dalam sebuah negara hukum, kebijakan-kebijakan, praktik-praktik regulatif termasuk konstitusi adalah wujud dari "norma-norma keadilan" (*normative Probleme des Gerechten*) dan norma "yang moral" (*das Moralische*). Klaim kesahihan atasnya memiliki kekuatan universalitas yang mampu mengikat seluruh partisipan komunikasi. (Hardiman, *op.cit* : 72). Hal ini berbeda dengan "norma evaluatif tentang hidup yang baik" (*evaluative Probleme des gutens Lebens*), dan "yang etis" (*das Ethische*), yang akan selalu membawa sifat partikular dan tendensius, karenanya harus dikalahkan.

Membentuk sebuah diskursus intersubjektif demi mencapai konsensus yang legitim dalam sebuah negara hukum berpenduduk 230 juta jiwa tentu bukanlah hal yang mudah. Pada saat inilah aktualisasi pers, media sebagai *the fourth estate* diperlukan. Jika sebelumnya media dikenal memiliki lima fungsi *Education/Edifying, Information, Surveillance, Entertainment, dan Watch Dog* (Turrow, 2009 : 15-20), maka Habermas merangkumnya, atau justru menambahkan fungsi baru yakni sebagai ruang publik/ *publik sphere* (Goode, 2005 : 120).

Media ibarat mengemban dua tugas utama. Pertama, secara aktif menjadi ruang kontestasi publik mempertentangkan klaim-klaim ketepatan pernyataan normatif, termasuk hukum positif yang akan terapkan bagi seluruh masyarakat. Kedua, secara kontinyu dan bertahap mengevaluasi kebijakan yang telah terapkan dalam masyarakat, untuk melihat relevansi ketepatan klaim normatif dari kebijakan/ regulasi tersebut, sembari membuka ruang diskusi intersubjektif baru demi menghasilkan konsensus yang lebih baik.

Media sebagai ruang publik menjadi sarana utama untuk terjalannya sebuah diskursus praktis. Diskursus praktis tidak memberikan norma-norma tertentu yang dianggap benar yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan orang. Ia adalah sebuah prosedur untuk menguji kesahihan norma-norma tersebut secara intersubjektif, maka ia tidak menjamin terlebih dahulu legitimitas atau kebenaran hasil-hasilnya. Habermas menegaskan bahwa setiap norma yang sah kiranya akan mendapatkan persetujuan semua orang yang bersangkutan dengannya, seandainya orang-orang ini dapat ikut serta di dalam sebuah diskursus praktis (Hardiman, 2011: 20). Sebuah pemikiran yang senada dengan sistem demokrasi itu sendiri. Ketika negara tidak mampu menyediakan ruang bagi "semua", maka media adalah yang harus bergerak sebagai medan representasi rakyat atas jaminannya sebagai *the fourth estate* dalam sistem demokrasi.

Thomas Jefferson berujar :

When the press is free and every man able to read, all is safe. The press is the best instrument for enlightening the mind of man, and improving him as a rational, moral, and sosial being (Rafferty dalam Hachten, 2005 : 30)

Jefferson, seorang pendukung rasionalitas, meminta bahwa setiap kebijakan pemerintah haruslah rasional di mata rakyat. Untuk mewujudkannya, bagi Jefferson, pers dan media adalah satu-satunya harapan. Ketika duo Bob Woodward dan Carl Bernstein membongkar skandal Watergate, mereka menunjukkan bahwa media membuka ruang bagi diskursus praktis. Washington Post membuka ruang diskusi intersubjektif bagi *Lebenswelt* yang mereka bentuk atas kasus tersebut. Pun investigasi terus dilakukan agar diskusi intersubjektif terus terjadi demi mempertanyakan klaim ketepatan kebijakan pembiayaan kampanye, Undang-Undang Penyadapan, Kebijakan Anonimitas, Kinerja FBI dan badan Yudikatif lainnya, bahkan *First Amendment* sebagai produk demokrasi paling manifes. Sama halnya seperti sebelumnya dilakukan oleh New York Times ketika membongkar *Pentagon Paper*.

1.5 Kerangka konsep

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kecenderungan pemberitaan demokratisasi di daerah di Indonesia. Isu-isu demokrasi apa sajakah yang lebih disaliansi oleh media, dalam meredefinisi proses demokratisasi, dalam pemberitaannya. Penelitian ini kemudian ingin secara lebih lanjut melihat apakah dalam memberitakan proses demokratisasi, media telah memenuhi cakupan-cakupan ideal isu demokratisasi.

Unit-unit analisis di bawah diturunkan dari beberapa referensi kerangka teori serta *preliminary research* yang saya lakukan guna mendukung penelitian ini.

Sub unit analisis jenis fakta dan narasumber diturunkan dari pemahaman mengenai proses produksi pesan media, serta pemahaman ruang publik yang menuntut proporsionalitas keterlibatan partisipan demokrasi dalam ruang publik.

Sub unit analisis indikator demokrasi dipinjam dari Freedom House dan worldaudit.org, sedangkan sub unit analisis Konflik Demokratisasi dan Sentimen Nasionalisme Snyderian diturunkan dari teorisasi konflik demokratisasi Jack Snyder yang ditulis dalam bukunya *From Voting To Violence* (2000).

Sub unit analisis Konklusi dan Saliansi Isu diturunkan dari hasil kombinasi pembacaan peneliti terhadap beberapa referensi dan riset pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap artikel-artikel awal Konsolidasi Demokrasi. Dari acuan tersebut nampak kecenderungan-kecenderungan isu utama hasil derivasi dari isu Political Rights, kecenderungan-kecenderungan isu utama hasil derivasi dari isu Civil Liberties, serta korupsi dan kebebasan pers.

Sub unit analisis Kritik dan Evaluasi Terhadap Proses Demokratisasi diturunkan dari pemahaman ruang publik dan diskursus praktis media. Dimana kritik dipandang sebagai bentuk keterlibatan media dalam proses diskursus. Sebagai ruang publik media seharusnya tidak berjarak. Namun justru terlibat sebagai partisipan demokrasi dalam proses diskursus.

Pertimbangan untuk menggabungkan beberapa kriteria dalam indikator-indikator di sub unit analisis Konklusi dan Saliansi Isu didasarkan pada pembacaan peneliti terhadap beberapa referensi (seperti misalnya Konflik Nasionalis & Sentimen Nasionalis adalah dua konsep integral dalam pemikiran Jack Snyder, sama halnya dengan kemiskinan & kesejahteraan yang merupakan konsep oposisional utama dalam pemikiran John Locke mengenai demokrasi)

Selain itu, saya mendasarkan pula pada prevalensi kedekatan satu kriteria dengan kriteria lain yang muncul berdasarkan hasil riset pendahulu yang saya lakukan. Seperti temuan bahwa pemberitaan yang menyinggung permasalahan otonomi daerah, umumnya mempertanyakan ketidakmerataan redistribusi SDA antara wilayah yang bersangkutan dengan pusat.

Penelitian ini dilakukan dengan mencatat identitas yang ada pada berita sebagai anggota sampel, seperti judul berita, tanggal, bulan, serta tahun terbitnya. Dan untuk analisis selanjutnya akan dilakukan dengan unit analisis dan kategorisasi sebagai berikut:

Tabel I.1 Unit analisis dan sub unit analisis penelitian

Unit Analisis	Sub Unit Analisis	Indikator	Sub indikator
Orientasi Pengemasan Berita	Jenis Fakta	<ul style="list-style-type: none"> Fakta psikologis Fakta sosiologis Kombinasi 	
	Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> Eksekutif Legislatif Yudikatif Pelaku Pasar/ Kapital <i>Civil society</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada
<i>Coverage</i>	Indikator Demokrasi <i>Freedom House</i>	<ul style="list-style-type: none"> Political Rights Civil Liberties Press Freedom Corruption 	<ul style="list-style-type: none"> Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada
	Konflik Demokratisasi dan	<ul style="list-style-type: none"> Sentimen Nasionalisme Sipil 	

	Sentimen Nasionalisme Snyderian	<ul style="list-style-type: none"> • Sentimen Nasionalisme SARA • Sentimen Nasionalisme Revolusioner • Sentimen Nasionalisme Kontra-revolusioner • Tidak ada ulasan 	
Pandangan Media	Konklusi dan saliansi isu	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Kepartaian, Pilkada, Korupsi • Otonomi Daerah, Redistribusi SDA, dan Pemekaran • Oligarki Kekuasaan, Eksesifitas Elite • Kewajiban dan hak-hak politik masyarakat • Progresivitas Akar Rumput • Diseminasi Ruang-Ruang Publik. • Kemiskinan dan Kesejahteraan • Penguatan Pluralisme, Multikulturalisme, HAM, dan Kesenjangan Sosial • Konflik Sosial, Sentimen Nasionalis • Pers • Lain-lain 	
	Kritik dan Evaluasi terhadap Proses Demoratisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kritik • Tidak ada kritik 	

1.6 Definisi Operasional

A. Orientasi Pengemasan Berita

A.1 Jenis Fakta

Jenis Fakta adalah unit analisis yang melihat bagaimana suatu fakta digali oleh jurnalis di lapangan. Unit analisis ini dibagi menjadi 3 indikator. Fakta

psikologis adalah fakta yang dibangun oleh jurnalis hanya berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber-narasumber. Fakta sosiologis adalah fakta yang dibangun oleh jurnalis berdasarkan pengamatan lapangan, studi kasus, dan observasi. Fakta kombinasi adalah fakta yang dibangun jurnalis dengan mengkombinasikan wawancara-wawancara dengan narasumber dan observasi lapangan.

A.2. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang didatangi, diwawancarai oleh jurnalis, dikutip langsung maupun tidak langsung, dan dari padanya data-data digali, didapatkan, dan disusun.

Sub unit analisis ini terbagi ke dalam beberapa indikator.

1. Eksekutif

Eksekutif adalah bagian dari jajaran pemerintahan, yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan (mengeksekusi) kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa wewenang eksekutif tingkat daerah antara lain diplomasi (berdiplomasi dengan daerah/ wilayah lain), administratif (melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara), militer (sebelumnya pemerintah tingkat daerah tidak memiliki wewenang untuk menggerakkan kekuatan militer negara. Namun dalam bahasan RUU Keamanan Negara, dicantumkan bahwa dalam situasi "darurat", gubernur dapat mengerahkan kekuatan militer sebagai penanggulangan konflik), dan legislatif (menyusun draf perda dan peraturan sejenis, serta membimbing selama proses pengesahan di legislatif).

Yang termasuk dalam jajaran eksekutif pemerintahan daerah adalah pemerintah provinsi (Gubernur dan jajaran pembantu pemerintahan provinsi di bawahnya), pemerintah kota/ kabupaten (bupati/ walikota serta jajaran pembantu

pemerintahan kota/ kabupaten di bawahnya), serta jajaran pemerintahan di bawahnya (kecamatan, kelurahan/ desa, pedukuhan, RW/ RT).

2. Legislatif

Legislatif adalah pihak otoritas daerah yang memiliki wewenang legislasi/ penyusunan dan pengesahan UU atau dalam konteks daerah perda, budgeting/ anggaran daerah, dan pengawasan kinerja lembaga eksekutif daerah. Pihak legislatif daerah dibagi menjadi dua tingkat. Daerah tingkat I atau provinsi (DPRD provinsi), dan Daerah Tingkat II atau kota/ kabupaten (DPRD kota/ kabupaten). Para anggota dari dua lembaga ini mewakili perspektif legislatif daerah.

3. Yudikatif

Yudikatif adalah jajaran otoritas daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang termasuk dalam jajaran yudikatif di daerah adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, Kejaksaan, kepolisian daerah dan hierarki di bawahnya, serta militer.

Pihak-pihak yang bekerja dalam kelembagaan tersebut dan menjadi narasumber, perspektifnya akan mewakili perspektif yudikatif.

4. Pelaku Pasar/ Kapital

Kehadiran pasar menjadi salah satu syarat mutlak demokrasi, terutama sebagai pemenuhan jaminan aspek *civil liberties* khususnya terhadap hak-hak privat. Dalam sistem demokrasi deliberatif, *Lebenswelt*/ dunia kehidupan demokratis dibangun atas triangulasi negara (eksekutif, legislatif, yudikatif)-pasar-dan masyarakat warga/ *civil society*.

Pasar dibedakan dari negara dan *civil society* karena bergerak atas tujuan yang berbeda pula. Pasar bergerak atas dorongan ekonomi dan proses kompetisi hak-

hak privat. Proses *survival* dibangun atas prinsip kompetisi dan rivalitas, bukan kemaslahatan bersama seperti diterapkan oleh masyarakat warga.

Yang termasuk ke dalam pelaku pasar/ kapital adalah perusahaan-perusahaan atau industri-industri privat maupun representasinya, pelaku usaha dan pasar modal, himpunan-himpunan pengusaha maupun representasinya, investor, dan sebagainya.

Kriteria ekonom harus diperjelas di sini. Sebagai contoh, dalam isu kenaikan upah minimum regional (UMR) buruh, pendapat yang berbeda bisa datang dari dua narasumber yang sama-sama diberi titel ekonom. Misalnya Sofjan Wanandi dan Anggito Abimanyu. Di sini peneliti harus jeli bahwa opini Sofjan Wanandi datang dari perspektifnya sebagai ketua APSI (Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia) yang mewakili perspektif Pelaku Pasar/ Kapital, sedangkan opini Anggito Abimanyu lahir dari perspektif akademisi, yang mewakili perspektif *Civil society*.

5. *Civil society*

Menurut Habermas, *civil society* atau *Zivilgesellschaft* atau masyarakat warga terdiri atas individu, perhimpunan individu, organisasi, gerakan, kolektivitas warga yang secara otonom membedakan dirinya dari pasar (karena itu Habermas membedakan *Zivilgesellschaft* dari *bürgerliche Gesellschaft*/ masyarakat borjuis yang terikat semata berdasarkan hubungan ekonomis sebagai sesama subjek hak-hak privat) dan negara (masyarakat warga berperan sebagai aktor ruang publik politis yang otonom terhadap otoritas sistem), serta secara bersama-sama membangun ruang-ruang diskursif dan mereproduksi ruang publik politis, demi kemaslahatan bersama (Hardiman, 2009 : 136).

Habermas mencirikan wilayah-wilayah para aktor masyarakat warga membangun ruang publik politis sebagai *pluralitas* (individu, keluarga-keluarga, kelompok informal, organisasi sukarela, tokoh kemasyarakatan), *publisitas* (media

massa, institusi kultural, kelompok budaya), *keprivatan* (lembaga-lembaga keterampilan individu, pengembangan moral), *legalitas* (serikat pekerja, LSM adjudikatif, lembaga-lembaga swadaya bantuan hukum, kelompok advokasi warga, kaum akademisi, dan sebagainya)

B. Coverage

Berdasarkan pemahaman humanisme, penolakan universalisasi ide Isaiah Berlin, sejarah kebebasan dan demokrasi, komparasi dengan sejarah demokrasi dan kebebasan di Amerika, pemahaman konflik-konflik dan sentimen nasionalis yang mungkin timbul dalam proses demokratisasi, serta indikator demokrasi yang digunakan oleh *Freedom House* dalam mengkaji demokratisasi negara-negara di dunia, maka unit analisis *coverage* akan digunakan untuk melihat, seberapa luas atau sempit cakupan pemberitaan Kompas terhadap isu demokratisasi di daerah-daerah di Indonesia.

Unit analisis ini dibagi ke dalam dua sub unit analisis yakni Indikator Demokrasi versi Freedom House dan World Audit Democracy, serta Konflik Demokratisasi dan Sentimen Nasionalisme Snyderian.

B.1 Indikator Demokrasi versi Freedom House dan World Audit Democracy

Sub unit analisis ini, digunakan untuk melihat apakah Kompas telah berusaha secara holistik memahami isu demokratisasi dari beragam aspek, atau sebaliknya bertendensi mensialiansi aspek tertentu, sembari meminggirkan aspek yang lain.

-Political Rights

Political Rights adalah indikator demokratisasi sebuah negara yang digunakan untuk mengukur ketersediaan dan jaminan akan hak-hak politik warga negara. Hak-hak politik tersebut secara spesifik dijabarkan lagi menjadi ***Election Rights*** (kepala negara atau kepala pemerintahan dipilih melalui pemilu yang adil dan bebas, sama halnya dengan legislatif. Dalam proses pemilu harus terjamin adanya hukum yang adil, kesempatan kampanye yang setara, polling yang adil, dan penghitungan surat suara yang adil dan presisi. Pemilih mampu secara bebas menyatakan suaranya kepada calon representatif), ***Opposition and Party Rights*** (Publik diharapkan memiliki cukup pilihan untuk berafiliasi dengan partai politik tertentu, dan tersedia sarana kompetisi di antara masing-masing partai politik. Terjaminnya kekuatan oposisi yang memadai, kekuatan oposisi secara *de facto*, dan kemungkinan yang realistis bagi oposisi untuk meningkatkan dukungan dan meraih kekuasaan lewat pemilu. Masyarakat tidak berada di bawah dominasi militer, kekuatan asing, partai-partai totaliter, hierarki religius, oligarki ekonomi, maupun kelompok kekuasaan lainnya), serta ***Minority and Ethnic Group Political Rights*** (dibuka ruang-ruang bagi kelompok etnis, budaya, dan minoritas untuk ambil bagian dalam proses konsensus pengambilan keputusan. Apakah pemerintah, atau kekuatan yang berkuasa, secara sengaja mengubah komposisi etnis maupun wilayah dalam rangka meruntuhkan nilai-nilai budaya atau menciptakan ketidakseimbangan politis dalam rangka dukungan bagi kelompok tertentu)

Jika dalam artikel Kompas menyoroti salah satu dari isu-isu tersebut di atas, maka Kompas tengah berusaha menyoroti aspek *political rights* dalam proses demokratisasi suatu daerah.

-Civil Liberties

Civil Liberties adalah indikator demokratisasi sebuah negara yang digunakan untuk mengukur jaminan akan kebebasan masyarakat sipil suatu negara. Kebebasan sipil tersebut secara spesifik dijabarkan lagi menjadi ***Social Equality and Cultural Expression*** (institusi religius bebas dari kontrol kelompok kepentingan, serta ada ekspresi religious baik publik maupun privat yang terjamin. Apakah ada kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi. Diskusi publik terbuka maupun diskusi privat terjamin keamanannya. Kebebasan media, sastra, dan ekspresi seni lainnya, Apakah ada jaminan kebebasan berpolitik bagi tiap golongan masyarakat. Apakah tersedia profesional-profesional bebas multi latar belakang, dan organisasi privat (termasuk di dalamnya partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga ad hoc, dan sebagainya)), ***Judiciary and Law Assurance*** (Apakah ada sistem peradilan yang independen. Apakah tatanan hukum berlaku bagi permasalahan sipil dan kriminal. Apakah populasi masyarakat mendapat perlakuan yang setara di bawah hukum, termasuk jaminan keamanan dan hukum bagi kolektivitas multi etnis. Apakah polisi mendapat kontrol dari masyarakat sipil. Apakah ada proteksi dari teror politis dan pemenjaraan yang tidak adil, pengasingan maupun penyiksaan, baik dari kelompok pendukung maupun oposan sistem. Serta bebas tidaknya masyarakat dari perang dan situasi pemberontakan. Apakah ada kebebasan dari pemerintahan ekstrem yang menyimpang dan korupsi), ***Private Economy*** (Apakah ada kesempatan yang setara untuk berbagi legitimasi pemenuhan ekonomi termasuk ketergantungan dari tuan tanah, pekerja, serikat buruh, birokrat dan berbagai rintangan lainnya, Apakah hak-hak properti aman. Apakah masyarakat memiliki hak untuk mendirikan bisnis privat), dan ***Individual Autonomy*** (kebebasan untuk bepergian (*travel/ mobilize*), pilihan untuk bertempat tinggal, pilihan untuk mencari pekerjaan. Termasuk juga

kebebasan dari indoktrinasi dan ketergantungan yang eksekutif dari negara, kebebasan bagi kehidupan privat personal sosial, termasuk kesetaraan gender dan preferensi seksual, pilihan untuk mencari partner menikah, dan jumlah anggota keluarga)

Jika dalam artikel Kompas menyoroti salah satu dari isu-isu tersebut di atas, maka Kompas tengah berusaha menyoroti aspek *civil liberties* dalam proses demokratisasi suatu daerah.

-Press Freedom

Press Freedom adalah indikator demokratisasi sebuah negara yang digunakan untuk mengukur jaminan akan kebebasan pers, sebagai instrumen penting dalam mengawal proses demokrasi suatu negara. Dalam mengkaji kebebasan pers di 194 negara mereka menggunakan tiga indikator utama, yakni *the legal environment, the political environment, and the economic environment*.

Legal Environment berfokus pada eksaminasi hukum dan regulasi yang memungkinkan timbulnya pengaruh terhadap media, maupun kecenderungan pemerintah untuk menggunakan hukum-hukum ini dan institusi legal dalam rangka mengekang kemampuan media untuk beroperasi. Proses eksaminasi mencakup dampak positif dari jaminan legal konstitusional untuk kebebasan berekspresi, aspek negatif potensial dari keamanan legislasi, undang-undang pidana dan statuta kriminal lainnya, pinalti untuk pencemaran nama baik dan fitnah, kemampuan untuk menggunakan legislasi kebebasan informasi, independensi dari badan peradilan dan pekerja media, surat ijin usaha penerbitan maupun regulasi yang dibutuhkan untuk menerbitkan produk media, serta kemampuan para jurnalis untuk beroperasi secara bebas.

Political Environment, Indikator ini mengevaluasi tingkat kontrol politik terhadap isi media. Termasuk independensi editorial baik terhadap media yang dimiliki negara maupun privat, akses terhadap informasi dan narasumber, proses sensor baik ekstra maupun intra media, kemampuan baik wartawan lokal maupun asing untuk meliput berita secara bebas dan tanpa intimidasi, ada tidaknya detensi dan penahanan arbitrer, kekerasan dan ancaman lainnya.

Economic Environment, Indikator ini melihat struktur kepemilikan media dan keterikatan produk pers terhadap aspek ekonomi lainnya. Seberapa transparan dan ada tidaknya konsentrasi kepemilikan, berapa besar biaya yang diperlukan untuk mendirikan media, termasuk juga ongkos produksi dan distribusi, proses selektif menahan pengaruh iklan maupun subsidi dari pemerintah atau aktor lainnya, dampak dari korupsi dan penyuapan terhadap konten media, serta dampak berkelanjutan dari situasi ekonomi negara terhadap perkembangan media.

Jika dalam artikel, Kompas menyoroti salah satu dari isu-isu tersebut di atas, baik dalam wujud kritik dan evaluasi, maupun observasi atas prestasi yang mungkin telah diraih, maka Kompas tengah berusaha menyoroti aspek *press freedom* dalam proses demokratisasi suatu daerah.

-Corruption

Isu korupsi dalam penelitian ini dibatasi pada korupsi politik dan korupsi keuangan. Kasus-kasus yang masuk dalam lingkup *money corruption* seperti gratifikasi, *mark up* anggaran, *money laundry*, donasi terhadap lembaga-lembaga semu, praktik jual-beli anggaran, anggaran pemerintah maupun parlemen yang inakuntabel, suap dalam rangka pemenangan perkara di pengadilan, serta segala

bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun *civil society*, demi menikmati uang negara yang bukan haknya.

Jika dalam artikel Kompas menyoroti salah satu dari isu-isu tersebut di atas, maka Kompas tengah berusaha menyoroti aspek *corruption* dalam proses demokratisasi suatu daerah.

B.2 Konflik Demokratisasi dan Sentimen Nasionalisme Snyderian

Konflik menjadi salah satu implikasi tak terelakkan dalam proses demokratisasi. Potensi konflik rawan terjadi ketika sentimen nasionalisme lahir. Sentimen nasionalisme adalah semangat eksklusif dan memiliki otoritas otonom atas kelompok, yang umumnya ditiupkan oleh para elit dalam masyarakat, dalam rangka mendorong atau menolak perubahan status quo dalam masyarakat. Demokratisasi memungkinkan sentimen ini meluas karena semangat kebebasan (berekspresi, berpendapat, beropini, menggalang suara, dan sebagainya) yang terbuka.

Sentimen nasionalisme ini dibagi menjadi empat kategori oleh Jack Snyder (2000) berdasarkan ide-ide yang digunakan sebagai pemicu serta parameter-parameter yang digunakan untuk menginklusi dan mengeksklusi seseorang dari kelompoknya.

-Nasionalisme Sipil

Landasan yang digunakan sebagai acuan kelompok adalah loyalitas terhadap seperangkat ide-ide dan lembaga-lembaga politik yang dianggap adil dan tangguh. Ide-ide politik yang diyakini, serta kehadiran lembaga-lembaga politik yang kuat. Seseorang diterima atau ditolak sebagai anggota kelompok ini terutama tergantung pada apakah orang itu lahir atau bertempat tinggal lama di wilayah bangsa tersebut,

atau fasih atau sefaham dengan ide-ide dan lembaga yang diyakini kelompok tersebut.

Semangat ini misalnya digunakan oleh mantan presiden Soekarno dalam menghidupkan semangat trikora guna merebut Papua. Ia menggunakan ide-ide saudara sebangsa dan negara kesatuan, sementara itu kekuatan militer dan politik Indonesia cukup diperhitungkan di dunia internasional. Kasus aktual lain misalnya nampak pasca pemilu Amerika Serikat. Pasca pemilihan Obama, pihak-pihak yang merasa tidak puas, khususnya perihal krisis ekonomi yang belum teratasi, mengirimkan petisi kepada Kongres dan menghidupkan kembali isu *secessionism*. Momen ini dibaca oleh kaum republikan, pihak oposisi, untuk memukul balik kaum demokrat. Sentimen ini ditiupkan karena ide politik kesejahteraan sangat penting di masa itu, serta semangat kebebasan khas Amerika, serta ketersediaan lembaga-lembaga politik yang memadai.

-Nasionalisme SARA

Karena kurang tersedia lembaga-lembaga demokrasi atau pemerintahan yang berfungsi baik untuk mendekatkan warga negara ke negara, tidak ada pilihan bagi pemimpin politik selain menggalang kesetiaan lewat ikatan-ikatan kultural. Imbauan nasionalis didasarkan pada budaya, bahasa, agama, pengalaman bersama, mitos nenek-moyang bersama, dan mereka menggunakan semua wawasan tersebut sebagai kriteria untuk menerima atau menolak seseorang sebagai anggota kelompok nasionalis tersebut.

Semangat politik massa ini masih kental terasa di Indonesia. Beragam identitas SARA digunakan sebagai pemicu semangat eksklusivitas kelompok, hingga berujung konflik, dan akhirnya menutupi kepentingan politik yang mungkin bermain di dalamnya. Kerusuhan Sampit, Poso, Ahmadiyah di Jawa Barat, dan sebagainya.

Sentimen ini ternyata masih menjadi favorit para elit dalam kampanye mereka. Sebagai contoh pasangan Foke-Nara dalam pilkada DKI Jakarta yang sering menggunakan politik identitas kaum Betawi, dan isu sektarian. Sementara Rhoma Irama yang sedang bersemangat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2014, juga menggunakan semangat nasionalisme SARA dengan retorikanya "di Indonesia seharusnya mayoritas yang berkuasa."

-Nasionalisme Revolusioner

Dalam pembangunan yang terbelakang, lembaga-lembaga untuk peran serta yang demokratis bisa tertinggal dibandingkan dengan tuntutan penduduk yang telah tergugah secara politis. Ide-ide politis menyadarkan rakyat akan harapan kehidupan sosial politik yang lebih baik, yang tidak mampu ditunjang oleh lembaga-lembaga politik yang ada. Harapan ini melahirkan tuntutan revolusioner untuk merubah rezim yang telah ada, keluar dari rezim, maupun melahirkan tatanan baru.

Nasionalisme revolusioner ini kini menjadi retorika populer negara-negara yang sedang terjerat krisis. Rezim yang berkuasa dijadikan kambing hitam sebagai rezim yang tak mampu menyejahterakan rakyat, dan kaum elit menawarkan alternatif sebuah janji revolusi untuk merubah rezim. Hal ini nampak dalam proses pemilu di negara-negara Asia Timur, seperti proses pemilihan Shinzo Abe di Jepang.

Di Indonesia, sentimen ini nampak dalam kasus Papua. Demokratisasi yang memberi akses informasi dan pengetahuan kepada masyarakat Papua, menyadarkan mereka akan kesenjangan ekonomi dan betapa tertinggalnya kesejahteraan pribumi. Sebagian dari rakyat Papua menginginkan revolusi, menuntut pelepasan diri dari rezim Indonesia (yang dianggap rezim Jawa/ Jakarta) dan menjadi negara merdeka.

-Nasionalisme Kontra-Revolutioner

Nasionalisme kontra revolusioner adalah semangat eksklusivitas yang digalang elit, maupun kelompok elit yang menolak perubahan status quo yang mungkin terjadi sebagai akses demokratisasi.

Sentimen ini nampak dalam usaha para mantan diktator Timur Tengah yang menolak mati-matian revolusi demokratisasi di negara mereka, dan mendorong semangat bela negara bagi para pendukung rezim untuk menentang oposisi.

Sekalipun terbagi menjadi empat kategori, Snyder sendiri mengungkapkan bahwa garis pembatas di antara keempatnya sangatlah tipis. Bukan tidak mungkin dalam satu peristiwa, terjadi saling tumpang tindih di antara keempat sentimen tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus Papua, sentimen nasionalisme yang ada bisa dilihat sebagai sentimen nasionalisme sipil, di mana semangat NKRI dipertahankan, dan retorika penghargaan akan kebhinnekaan menjadi keniscayaan. Ketika isu yang diangkat adalah seputar kekerasan yang dilakukan personel militer, atau semangat primordial masyarakat papua, maka sentimen nasionalisme SARA yang lebih menonjol. Ketika isu separatis menjadi topik utama dan yang disorot adalah aktivitas Organisasi Papua Merdeka serta pergerakannya, maka sentimen nasionalisme revolusioner lebih terasa.

Justru hal ini menarik untuk diteliti karena kita bisa melihat isu sentimen nasionalisme mana yang lebih sering dibingkai dalam artikel demokratisasi yang diturunkan Kompas. Apakah ada kecenderungan untuk melihat isu sentimen nasionalisme dalam proses demokratisasi suatu wilayah dari sudut pandang tertentu?

-Tidak ada ulasan

Jika Kompas sama sekali tidak membahas permasalahan yang potensial memicu konflik berdasarkan sentimen nasionalisme di atas

C. Pandangan Media/ Fungsi Deliberatif

C.1. Konklusi dan Saliansi Isu

Sub unit analisis ini merupakan bentuk spesifik dan pengerucutan dari unit analisis *Coverage* sebelumnya. Secara umum unit analisis *Coverage* ingin melihat luas sempitnya cakupan isu demokrasi yang diberitakan oleh Kompas, sedangkan sub unit analisis ini lebih cenderung melihat bagaimana isu yang umum tersebut, diprevalensikan sehingga menjadi konklusi besar isu demokratisasi di Indonesia.

Dalam mencapai konklusi, tentu melibatkan proses eksklusi dan saliansi. Dengan metode analisis isi yang saya pilih, saya tidak akan berkuat untuk menemukan *hidden agenda* di balik proses eksklusi dan saliansi (yang dimungkinkan oleh metode framing atau CDA). Saya lebih berusaha melihat bagaimana isu demokrasi yang plural dan beragam, dipilah dan dipilih berdasarkan tingkat kepentingannya untuk diberitakan, (yang tentu saja melibatkan proses redefinisi dari Kompas) sehingga kemudian menjadi sebuah konklusi yang prevalen mengenai isu demokratisasi di Indonesia.

Temuan nantinya juga akan digunakan untuk melihat aktualisasi pers dalam menjalankan peran deliberatifnya sebagai ruang publik. Media sebagai ruang publik, mengangkat isu-isu demokratisasi dari masyarakat, kemudian dikemas seperti nampak dalam pemberitaan, dan representasi isu itulah yang akan ditangkap oleh *state* maupun otoritas terkait untuk kemudian direspon, dan siklus ini berulang lagi terus menerus. Isu demokratisasi apakah yang oleh Kompas didefinisikan paling

krusial sehingga paling sering untuk dibahas, isu itulah yang akan mendapat respon signifikan. Pertanyaannya adalah, isu apa saja yang mungkin dirasa penting bagi Kompas dalam proses demokratisasi di Indonesia?

Saya berusaha untuk menyusun isu-isu yang dirasa krusial dalam pemberitaan mengenai demokrasi. Isu-isu ini disusun berdasarkan studi literatur dalam kerangka teori mengenai demokrasi yang dipaparkan dalam sub bab kerangka teori sebelumnya. Secara sederhana, konklusi isu ini nantinya akan ditemukan dari ide utama dari setiap artikel yang diturunkan.

-Sistem Kepartaian, Pilkada, Korupsi

Yang menjadi isu utama yang diangkat adalah permasalahan seputar sistem kepartaian. Seperti pendanaan partai dan akuntabilitas, koalisi dan oposisional, ideologi kepartaian, kaderisasi, hierarki kepartaian, elite partai, hegemoni partai di wilayah tertentu, dan sebagainya.

Selain itu permasalahan pilkada (pemilihan kepala daerah), serta sistem pelaksanaan pilkada langsung termasuk dalam indikator ini. Hal ini dikarenakan pilkada erat kaitannya dengan sistem kepartaian. Sangat jarang pemimpin daerah muncul dari golongan independen. Sedangkan dimasukannya korupsi karena pengelolaan partai dan usaha suksesi pilkada rentan dari bahaya korupsi. Partai, Pilkada, dan korupsi saling berkelindan dalam pelaksanaan politik praktis di daerah.

- Otonomi Daerah, Redistribusi SDA, dan Pemekaran

Litvack & Seddon (1999, dlm Imawan, 2007 : 61) mengartikan desentralisasi sebagai *the transfer of authority and responsibility for publik from the central government to subordinate or quasi-independent government organization, or the*

private sector. Desentralisasi merupakan salah satu manifestasi tujuan politik demokratisasi. Hubungan erat desentralisasi dengan demokratisasi ditegaskan Samuel Huntington (1996) yang menegaskan bahwa desentralisasi sebenarnya merupakan salah satu wujud dari adanya gelombang demokratisasi ketiga.

Desentralisasi dalam rangka demokratisasi politik dan kekuasaan, merupakan salah satu upaya terwujudnya *good governance*. 9 karakteristik *good governance* yang diajukan UNDP adalah *participation* (partisipasi), *rule of law* (supremasi hukum), *transparency* (transparansi), *responsiveness* (daya tanggap), *consensus orientation* (berorientasi pada konsensus), *equity* (kesetaraan), *effectiveness and efficiency* (efektifitas dan efisiensi), *accountability* (akuntabilitas), dan *strategic vision* (visi strategis).

Otonomi dan pemerintahan daerah di Indonesia yang lahir pasca reformasi, dan mendapatkan legitimasinya lewat UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu upaya demokratisasi politik demi mencapai *good governance*. Usaha Kompas untuk menyoroti seberapa jauh upaya pencapaian masing-masing indikator *good governance* telah dilaksanakan oleh masing-masing daerah akan menjadi pertimbangan indikator ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, konflik antara pemerintah daerah-dan pemerintah pusat sering terjadi. Selain kewenangan administratif, konflik yang umum meruyak adalah permasalahan redistribusi SDA (Sumber Daya Alam). Muncul anggapan bahwa kekayaan alam di daerah alih-alih digunakan untuk menyejahterakan masyarakat lokal, keuntungannya lebih banyak mengalir ke kantong pemerintah pusat di Jakarta. Selain itu konsesi lahan juga sering dipraktikan “raja-raja kecil” di daerah dalam rangka pemenangan proses pemilu, mengakibatkan redistribusi SDA yang tidak bisa dirasakan oleh warga sekitar.

Populernya wacana Otonomi Daerah, berpengaruh pula terhadap isu pemekaran. Terdapat lebih dari 300 usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang diterima pemerintah dan DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR A, Hakam Naja, hampir setiap bulan ada usulan pembentukan DOB (Kompas, 20/11/2012). Sayangnya banyak pengamat menemukan bahwa praktik otonomi daerah hanya melahirkan raja kecil-raja kecil baru di daerah. Selain kontrol pusat yang melemah, pemekaran wilayah tidak langsung berakibat pada kesejahteraan masyarakat, tetapi hanya memenuhi aspirasi dan kepentingan elite politik lokal. Pemekaran justru getol diperjuangkan kelompok elit, termasuk para oportunis proyek dan politik dagang sapi, karena kepentingan bermain atas nama pemekaran.

Usaha Kompas untuk mengevaluasi proses Otonomi Daerah, Redistribusi SDA, Pemekaran wilayah berdasarkan prinsip-prinsip demokratisasi maupun good governance menjadi pertimbangan indikator ini.

-Oligarki Kekuasaan, Eksesifitas Elite

Elite pemerintah yang memimpin suatu wilayah, memiliki kewenangan yang besar. Yang termasuk dalam kategori elite pemerintah di sini antara lain Gubernur incumbent, Walikota/ Bupati, camat dan lurah. Isu oligarki adalah pengelompokan kekuasaan (*power*) ke dalam satu lingkaran eksklusif, baik kelompok bisnis / usaha, golongan maupun kekerabatan, sehingga membentuk suatu dinasti kekuasaan dimana kekuasaan tersentralisasi, massif, dan berjarak dari masyarakat yang dipimpinnya. Kekuasaan ini menjadi eksesif dan memungkinkan penyalahgunaan penerapannya oleh elite.

- Kewajiban dan Hak-Hak Politik Masyarakat

Indikator ini diderivasikan khususnya dari parameter *political rights* demokrasi yang dipaparkan sebelumnya. Indikator ini akan melihat hak –hak dan kewajiban elektoral masyarakat, tanpa terlalu banyak berbicara mengenai proses penyelenggaraan pemilu, karena telah diakomodasi oleh indikator lainnya.

Pilihan untuk golput (tidak mencoblos), akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam parpol, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penyelenggaraan pemilu, hak kaum minoritas (perempuan, transgender, dan sebagainya) untuk berkiprah dalam politik praktis, proses ideologisasi politik terhadap masyarakat baik koersif maupun edukatif, hak oposisi politik masyarakat, hak untuk berdemonstrasi, hak untuk menuntut proses regulasi ulang perda yang tidak konstruktif, dan sebagainya.

Indikator ini lebih merupakan indikator evaluatif terhadap ketersediaan maupun ketidaktersediaan jaminan terhadap hak-hak politik masyarakat. Serta keterlaksanaan, maupun ketidakterlaksanaan kewajiban politik masyarakat. Indikator yang menyoroti proses ekstra politik praktis akar rumput dalam rangka memengaruhi proses pengambilan kebijakan secara mandiri dan independen, diakomodasi oleh indikator selanjutnya.

-Progresivitas Akar Rumput

Akar rumput (*grass roots*) adalah personifikasi dari masyarakat sipil yang berada dalam stratifikasi terendah sistem politik karena sifatnya yang paling “powerless”. Padahal secara ideal, baik teoritis maupun pragmatis, rakyat dan masyarakat sipil lah yang paling ”powerful” dan menjadi penentu setiap kebijakan politik.

Isu Progresivitas Akar Rumput adalah proses Kompas menyoroti dinamika dan pergerakan-pergerakan progresif yang dinisiasi secara swadaya dengan inisiatif mandiri oleh masyarakat sipil, dalam rangka memengaruhi proses pengambilan kebijakan, maupun menciptakan *social order dan social life* yang lebih baik. Dari, oleh, dan untuk masyarakat tanpa perlu berpangku tangan menunggu gerak tanggap pemerintah.

- *Diseminasi Ruang-Ruang Publik*

Kehadiran ruang publik adalah salah satu manifestasi kedaulatan rakyat seperti yang diagungkan sistem demokrasi. Seperti dipahami oleh Habermas, *Öffentlichkeit* (*publik sphere/ ruang publik*) adalah keadaan dapat diakses oleh semua orang. Ciri inklusif dan terbuka ini, menunjukkan bahwa ruang publik tidak bisa dibatasi hanya oleh sekat fisik maupun institusi belaka. Sebaliknya ruang publik politis tidak lain daripada hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari para warga negara dapat berlangsung. Konsolidasi atasnya memungkinkan kukuhnya solidaritas warga sebagai bentuk resistensi terhadap sumber-sumber lain (pasar dan negara).

Diseminasi ruang publik menjadi penting, karena semakin beragam ruang publik yang muncul dalam masyarakat, semakin terjamin pula diversifikasi opini yang akan memperkaya sistem demokrasi, serta kontrol yang semakin kuat dari *civil society* terhadap proses regulatif negara, dan *mainstream* pasar/ kapital.

Rapat-rapat rutin informal di tingkat RT, diskusi berkala mahasiswa, orasi budaya yang digelar LSM maupun komunitas budaya, seminar-seminar anti kekerasan dan diskriminasi gender, diskusi warung kopi, perkelasan informal, dan sebagainya, selama berusaha membangun sebuah diskursus praktis,

mempertany akan-mengevaluasi-mendekonstruksi klaim-klaim ketepatan yang dibangun oleh sistem (pasar dan negara) menjamin terjadinya ruang publik

- Penguatan Pluralisme, Multikulturalisme, HAM, dan kesetaraan sosial

Demokrasi tumbuh berakar dari kebebasan. Baik sejak Herodotus maupun Pericles mendefinisikan kebebasan ala Yunani kuno, maupun hingga para pemikir humanis mendekonstruksi kebebasan yang memanusiakan. Demokrasi memuliakan kebebasan individu. Secara sederhana, individu yang tidak bebas, tidak dapat berdemokrasi

Selain itu demokrasi membuka ruang ruang seluas-luasnya bagi masing-masing *locus* masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan penentuan kebijakan. Dalam sebuah kelompok masyarakat yang plural, yang belum siap untuk berkonfrontasi dengan perbedaan yang dibawa oleh komunitas lain, terutama ketika perbedaan ini menentukan sebuah putusan kebijakan yang berpengaruh pula bagi hidup mereka, sentimen dan konflik adalah sebuah keniscayaan.

Di lain pihak elit yang tak ingin *status quo* terusik akibat rotasi kekuasaan sebagai syarat mutlak demokrasi, berpotensi menciptakan pemerintahan diktator tangan besi yang pada akhirnya memberangus hak-hak asasi manusia, khususnya kebebasan berserikat & berpendapat. Konflik HAM terjadi.

Kebebasan seharusnya juga menjamin kesetaraan warga masyarakat. Masyarakat bebas untuk memeluk agama dan mengekspresikannya, termasuk kebebasan untuk menolaknya. Hak-hak minoritas dilindungi. Masyarakat berhak atas pendidikan layak, pekerjaan, dan kesehatan yang nir diskriminasi. Masyarakat bebas untuk memilih partner hidup dan preferensi seksual. Sama halnya identitas gender

maupun orientasi seksual seharusnya tidak menjadi pembeda hak sosial-politik seseorang.

Jika isu-isu tersebut di atas menjadi ide utama artikel, maka Kompas tengah menyorot permasalahan pluralisme, multikulturalisme, HAM, dan kesetaraan sosial dalam proses demokratisasi di Indonesia. Ruang lingkup indikator ini dibatasi hanya pada dimensi penguatan. Artinya indikator ini mengakomodasi perjuangan-perjuangan LSM, komunitas, maupun individu dalam menegakkan semangat pluralisme, multikulturalisme, HAM, dan kesetaraan sosial di daerah-daerah di Indonesia.

- Konflik Sosial dan Sentimen Nasionalis Snyderian

Indikator konflik nampaknya adalah yang paling manifes di antara indikator lainnya. Seperti telah diperjelas dalam kerangka teoritik Sentimen Nasionalis Snyderian sebelumnya, bahwa proses demokratisasi cenderung sarat konflik.

Indikator ini mencakup segala macam bentuk konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal, dengan ruang lingkup yang beragam (sektarian, agraria, politik, ideologis, militer-polri, antar golongan, dsb) serta bentuk-bentuk sentimen nasionalis seperti yang dipaparkan di paparan mengenai sentimen Nasionalis Snyderian sebelumnya.

Jika sebelumnya indikator Penguatan pluralisme, multikulturalisme, Ham, dan kesetaraan sosial, berusaha melihat perjuangan-perjuangan menegakkan semangat tersebut, maka indikator ini lebih menyoroti konflik-konflik yang timbul sebagai bentuk resistensi maupun represi terhadap semangat-semangat tersebut.

Indikator ini akan lebih bertendensi untuk menyorot konflik fisik, maupun konflik laten yang berpotensi memicu ketegangan fisik antar elemen masyarakat.

-Pers

Isu pers di daerah tentu tidak luput dari permasalahan demokratisasi. Mengingat tidak sedikit pers-pers daerah yang dimiliki dan menjadi bagian dari emperium pers Jakarta. Tentu menarik melihat bagaimana pers yang demikian berusaha menyoroti permasalahan lokalitas dengan kemudi dari pusat. Segala permasalahan pers, isu kepemilikan, konvergensi, intimidasi terhadap kebebasan pers, inkompetensi wartawan, kontestasi ideologis, kapabilitas dalam memberdayakan pilar-pilar demokrasi di daerah, keberpihakan terhadap elite, keberpihakan terhadap masyarakat, dan sebagainya, menjadi pertimbangan dalam indikator ini.

- Dll

Indikator ini mewadahi isu-isu lain yang mungkin muncul, di luar kedelapan indikator di atas.

C.2 Kritik dan Evaluasi Terhadap Proses Demokratisasi

Media sebagai ruang publik adalah medan diskursus praktis antara masing-masing anggota komunitas demokratis. Artinya ia adalah entitas yang tidak bebas nilai. Ia menciptakan medan demokrasi deliberatif, namun ia juga harus proaktif mengawal proses demokrasi itu sendiri. Ia mengevaluasi proses demokrasi untuk kemudian diwacanakan dalam siklus diskursus praktis yang berulang.

Kritik adalah satu bentuk evaluasi. Kritik dan evaluasi tersebut dibagi ke dalam 2 indikator

- Ada kritik

Kompas menyajikan kritik jika ia mengevaluasi, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menonjol dalam proses demokratisasi wilayah tertentu, untuk kemudian dielaborasi sembari menyajikan alternatif-alternatif penyelesaian atau solusi. Kompas tidak hanya menyajikan kekurangan dari proses demokratisasi yang tengah berlangsung, namun juga mengulas aspek-aspek positif yang distingtif ada di wilayah tersebut, untuk terus dipertahankan atau dikembangkan menjadi semakin baik.

-Tidak ada kritik

Indikator ini muncul jika di dalam artikel, Kompas tidak menyajikan elaborasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang diangkat. Semata mendeskripsikan bahwa permasalahan itu ada, tanpa memberikan kritik maupun solusi alternatif. Hal ini mungkin terjadi mengingat sejarah Kompas yang pernah oleh Rosihan Anwar dijuluki sebagai ”jurnalisme kepiting”, berusaha untuk terus mengambil jarak dengan objek pemberitaan dan tidak tendensius.

Fakta psikologis dari narasumber hanya digunakan sebagai proses afirmasi. Tidak ada pemilihan narasumber ahli yang akan memberikan pandangan evaluatif maupun alternatif terhadap isu yang diangkat.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Teknik Penelitian

Peneliti menggunakan metode analisis isi dalam penelitian ini karena analisis isi merupakan sebuah metode yang salah satu tujuannya adalah menggambarkan karakteristik pesan-pesan dalam ranah publik melalui perantaraan teks (Frey et al.,

1991:212). Ditunjang pula dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh analisis isi, yaitu :

1. analisis isi merupakan metode yang tidak mencolok (*unobtrusive*)
2. analisis isi menerima bahan yang tidak terstruktur
3. analisis isi peka terhadap konteks, sehingga dapat memproses bentuk-bentuk simbolik
4. analisis isi dapat mengatasi data dalam jumlah besar.

(Krippendorff, 1993:34)

Berbagai pendapat dilontarkan oleh para ahli untuk mendefinisikan analisis isi. Menurut pendapat Krippendorff, analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan) yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. (Krippendorff, 1993:15). Sedangkan Berelson (1952) mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak (*manifest*). (dalam Krippendorff, 1993:16). Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Stone,dkk.(1966) yang juga mendefinisikan analisis isi sebagai teknik analisis untuk menarik inferensi dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dalam sebuah teks secara sistematis dan objektif. (dalam Frey,*et.al*, 1991:212).

Sedangkan Kerlinger (2000) memberikan definisi analisis isi dengan menyebutkan tiga konsep yang memerlukan elaborasi, yaitu :

1. Sistematis

Dimana peneliti harus menggunakan prosedur dan aturan yang sama untuk menganalisis semua data dalam penelitian.

2. Objektif

Menekankan pada hasil yang sama apabila penelitian tersebut dilakukan kembali oleh peneliti yang lain. Kerlinger lebih menekankan pada penentuan unit analisis dan definisi operasional penelitian.

3.Kuantitatif

Penghitungan penting dalam analisis isi karena akan membantu peneliti untuk mencapai keakuratan hasil penelitian, sesuai dengan tujuan dari analisis isi yaitu representasi yang akurat dari isi sebuah teks.

(Wimmer&Dominick,,2003:141)

Analisis isi menurut John Fiske (1990) didesain untuk menghasilkan sebuah perhitungan terhadap isi pesan yang tampak (*manifest*) secara objektif, terukur dan dapat diverifikasi. Untuk itu, analisis isi akan mencapai hasil yang lebih akurat apabila digunakan untuk mengukur data dengan skala besar, dengan unit analisis apa saja yang diinginkan oleh peneliti selama unit analisis tersebut teridentifikasi dan muncul secara berkala. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga validitas perhitungan statistik yang nantinya dilakukan oleh peneliti. (Fiske, 1990:136)

I.7.2 Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti (Nazir,1988:63). Peneliti berusaha mendeskripsikan kecenderungan pemberitaan konsolidasi demokrasi di daerah oleh surat kabar harian Kompas, dalam rentang waktu Januari 2011, hingga Juni 2012.

Proses deskripsi terbagi ke dalam dua tahap. Deskripsi kuantitatif, yang akan menyajikan hasil olahan kuantifikasi temuan data dalam wujud distribusi frekuensi,

cross tab, dan tabulasi data. Proses ini akan menyajikan secara telanjang dan literal hasil olahan teks berita yang dilakukan oleh peneliti.

Selanjutnya data akan diolah secara kualitatif dengan kajian pustaka dan kerangka teoritis yang telah disiapkan, untuk menjawab rumusan masalah idealisasi kecenderungan pemberitaan yang dikomparasikan dengan temuan manifes penelitian. Berbeda dari sifat deskriptif kuantitatif di tahap pertama, pada tahap ini, hasil olahan tidak akan bebas nilai dan akan banyak diisi oleh argumentasi dan elaborasi peneliti, berbasis pada kerangka teori dan kajian pustaka sebagai data sekunder. Hasil olahan kemudian dideskripsikan secara kualitatif, demi mendapatkan sifat kedalaman.

I.7.3 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah media **Surat Kabar Harian Kompas**, periode Januari 2011-Juni 2012, yang berjumlah kurang lebih **540 edisi harian**. Sedangkan untuk penarikan sampelnya, menggunakan salah satu metode non probabilitas yakni *purposive sampling*. Sampel purposif adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti. Sesuai dengan namanya, peneliti secara sengaja mengambil sampel dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Eriyanto, 2007: 250). Teknik sampel ini membawa sifat metode non probabilitas, yakni konklusi dari hasil penelitian terhadap sampel, tidak membawa sifat generalisasi.

Secara purposif, peneliti memilih Kompas karena Kompas menjadi yang pertama (dan hingga skripsi ini selesai ditulis) menjadi satu-satunya yang secara komprehensif, menyajikan tulisan mengenai proses demokratisasi di tiap-tiap

provinsi di Indonesia. Rubrik “Konsolidasi Demokrasi”, adalah rubrik suplementasi, yang diturunkan setiap bulan, di halaman 4 atau 5, bersama-sama dengan berita-berita lainnya di rubrik politik dan hukum. Rubrik konsolidasi demokrasi ini diturunkan setiap bulan, dalam format serial. Satu fokus daerah per bulan. 7 hingga 9 artikel setiap satu fokus daerahnya.

Saya membagi timeframe penelitian dari Januari 2011 (sejak rubrik konsolidasi demokrasi pertama kali dimulai) hingga Juni 2012. Pertimbangan yang diambil ada dua. *Pertama*, pertimbangan sample purposif. Dalam jangka waktu timeframe tersebut (18bulan) berarti telah 18 provinsi tercakup dalam pemberitaan. 50% lebih dari total provinsi di Indonesia. Saya yakin kecenderungan yang didapatkan tidak akan jauh berbeda ke depannya jika liputan konsolidasi demokrasi diteruskan.

Kedua, adalah pertimbangan pragmatis peneliti. Juni 2012 saya telah memulai proses penyusunan proposal penelitian. Saya memutuskan untuk mulai mengumpulkan artikel agar proses penyusunan bisa segera dimulai.

Dalam timeframe 18 bulan tersebut dan proses sampling purposif terhadap rubric “konsolidasi demokrasi”, didapatkan **117 artikel** yang selanjutnya akan menjadi data primer penelitian.

I.8 Sistematika Penyajian

Laporan hasil penelitian ini terbagi dalam empat bab besar. Bab yang pertama merupakan latar belakang pengambilan topik penelitian beserta penjelasan mengenai teori yang digunakan. Dalam bab ini pula, peneliti menentukan hal-hal apa saja yang menjadi fokus kajian dalam melihat pemberitaan mengenai konsolidasi

demokrasi di daerah-daerah di Indonesia, pada rentang waktu 1, 5 tahun terhitung mulai Januari 2011 hingga Juni 2012.

Penjelasan mengenai obyek penelitian akan dijelaskan pada bab dua. Dalam penelitian ini, artikel-artikel berita yang bersumber dari Surat Kabar Harian Kompas akan menjadi objek penelitian. Pada bab II ini pula akan dijelaskan sejarah dan hal umum lainnya tentang perusahaan media tersebut beserta artikel-artikel berita yang akan diteliti.

Bab III akan berisi analisis data, yaitu hasil pengkodean yang dilakukan oleh *coder* dan peneliti, uji reliabilitas, dan juga mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang telah dipilih untuk digunakan. Melalui hasil analisis yang terdapat pada bab III inilah, akan diketahui kecenderungan pemberitaan mengenai proses demokratisasi di Indonesia. Hasil analisis kemudian akan secara subyektif dianalisis oleh peneliti dikaitkan dengan kerangka teori yang tercantum pada bab I, untuk melihat apakah hasil temuan data telah menunjukkan performa ideal pers dalam mengawal proses demokratisasi.

Bab empat adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.